

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

V.1. Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013

Dalam sub bab ini berisi uraian mengenai Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai di tahun 2013, dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana perencanaan pengembangan pariwisata, Kebijakan yang dibuat dalam rangka mendorong pertumbuhan pariwisata, target yang ingin dicapai serta realisasi dari program-program kegiatan.

V.1.1. Perencanaan Pengembangan Pariwisata

Salah satu tujuan mendasar yang ingin dicapai negara berkembang seperti Indonesia saat ini adalah tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mantap. Usaha kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang secara terus menerus diupayakan pengembangannya agar dapat didayagunakan sebagai salah satu andalan kegiatan perekonomian nasional dan daerah. Berkembangnya kegiatan pariwisata didaerah akan memberikan pengaruh dan mendorong pembangunan sektor-sektor lain khususnya dalam hal menembus lapangan pekerjaan dan peluang untuk usaha, sehingga dapat diharapkan pada proses perubahan kearah lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasmita,1997;9).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah

daerah diberi wewenang yang luas untuk mengelola kekayaan daerah guna dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah (Rozali 2002; 2). Keberadaan UU/32 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa angin segar bagi daerah untuk menunjukkan potensi diri dalam melakukan pengelolaan segala aset yang dimiliki.

Kabupaten Pulau Morotai dimekarkan dari Kabupaten Induk Halmahera Utara dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai adalah amanah (komitmen) dan momentum strategis untuk mengawali proses dan menghantarkan pembangunan kepada pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat. Momentum yang harus dimanfaatkan secara baik untuk meramu posisi tawar (pembangunan) daerah menjadi terhormat. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Rusli Sibua selaku Bupati di Pulau Morotai 2011-2016.

Pariwisata merupakan prioritas utama pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai, hal ini dikarenakan morotai memiliki beragam potensi yang unggul dari sector pariwisata sehingga diharapkan mampu membuka lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran dll. Selain itu kami juga melakukan pengkajian tersendiri dalam upaya melihat potensi daerah tersebut, maka dari itu, visi kami yaitu Morotai berbasis kelautan dan pariwisata, membangun pulau morotai menuju masyarakat mandiri, adil sejahtera damai damai. (Wawancara pada hari Selasa 09/07/2013, pukul 11.30 WIT).

Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa Pemkab Pulau Morotai memprioritaskan sector pariwisata sebagai *leading sector* pembangunan di daerah dalam rangka untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten yang masih baru ini, dikarenakan begitu beragamnya potensi wisata yang telah terdeteksi keberadaannya, sehingga penting

kiranya potensi tersebut untuk didorong. Karena pembangunan merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Katz (dalam Moelyarto,1999:32)

Jadi Pada dasarnya Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut demi berjalannya roda pemerintahan dan proses pembangunan daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) perlu melakukan penataan administrasi pembangunan melalui penyediaan dokumen perencanaan yang bermutu, berikut

adalah wawancara dengan Samsudin A. Kadir selaku Kepala Bappeda Kabupaten Pulau Morotai sebagai berikut :

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati, kami selalu melakukan terobosan, baik fisik maupun perencanaan kebijakan non fisik dalam rangka mejewantahkan visi dan misi tersebut. hal ini telah dimuat dalam lembaran RPJMD sebagai acuan 5 (lima) tahun kedepan, dan menjadi keharusan sebagai bagian dari mensukseskan Visi dan misi dari Bupati terpilih.(Wawancara pada hari jumat 12/07/2013. Pukul 14.00. WIT).

Sebagai suatu dokumen perencanaan daerah, RPJMD memuat perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang penyusunannya didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (bila telah disusun) dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Dalam kondisi belum adanya RPJP Daerah, penyusunan RPJMD dapat pula berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah yang juga merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang yang wajib disusun pada tahapan awal pembangunan daerah. Secara fungsional, RPJMD merupakan dokumen acuan dan pedoman dasar pembangunan di tingkat daerah, guna mencapai sejumlah tujuan dan target jangka menengah daerah yang konsisten dengan visi, misi dan program kepala daerah selama masa jabatan kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD adalah program dan kegiatan yang disusun menurut kewenangan dan urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam undang-undang dengan mempertimbangkan determinan strategis, termasuk kemampuan pembiayaan daerah. Pada tahapan implementasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pedoman taktis dan strategis bagi Kepala Daerah beserta perangkat pemerintahannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam pengembangan potensi pariwisata di Pulau Morotai. Namun saat ini kondisi obyektif di Kabupaten Pulau Morotai menunjukkan bahwa RPJMD sebagai acuan pembangunan daerah lima tahun kedepan telah direvisi demi perbaikan dan arah pembangunan yang lebih tepat. Akan tetapi, RPJMD yang di revisi sampai saat ini, belum didistribusikan kepada sebagian besar jajaran SKPD yang ada di lingkup Pemkab Pulau Morotai. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Revi Dara selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.

RPJMD memuat rencana program yang diusulkan oleh semua SKPD yang berada di jajaran lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dengan tujuan agar arah prioritas pembangunan dapat ditentukan sesuai dengan Visi dan Misi kepala daerah dapat tercapai. Namun yang anehnya pada saat ini, ketika RPJMD di revisi tidak sepengetahuan kami dan belum didistribusi ke kami (belum adanya informasi dari BAPEDDA). Sehingga kami hanya berdasar pada RPJMD yang belum direvisi. (Wawancara pada hari senin 15/07/2013. Pukul 09.20. WIT).

Dari wawancara tersebut mengindikasikan bahwa RPJMD sebagai acuan bagi semua SKPD yang ada di lingkup Pemkab Pulau Morotai belum didistribusikan kepada jajaran SKPD dan direvisi nya RPJMD tanpa ada sepengetahuan dari Instansi terkait. Padahal RPJMD memuat rencana program yang diusulkan oleh semua SKPD yang ada di lingkup Pemkab pulau morotai sehingga dapat dianalisis bahwa tidak adanya kordinasi dari BAPEDDA kepada semua SKPD yang ada di jajaran Pemkab Pulau Morotai menyebabkan belum

jelasan arah pembangunan lima tahun kedepan. Hal tersebut di akui oleh Bapak Samsudin A. Kadir selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. menurut beliau bahwa RPJMD baru dimulai setelah adanya Visi-Misi Bupati terpilih, disadari memang bahwa saat ini RPJMD telah direvisi, semua itu dilakukan karena berbagai pertimbangan kondisi dan tuntutan di daerah. Dan Bappeda selalu bertanggung jawab dalam setiap kegiatan dan program kerjanya yaitu, termuat dalam LKPPD sebagai bentuk pertanggung jawaban ke DPRD. (Wawancara pada hari jumat 12/07/2013. Pukul 14.00. WIT). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan yang termuat dalam RPJMD Kab. Pulau Morotai belumlah terarah dan masih dalam pencarian format baku dalam memandang pembangunan lima tahun kedepan sehingga di revisinya RPJMD. Padahal dalam sistem penyelenggaraan dan pembangunan di daerah memiliki keterkaitan erat antara perencanaan dan institusi yang ada di daerah. hal tersebut tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan mengingat akan tuntutan perubahan dan dinamika lingkungan. Sehingga adanya consensus dan komitmen segenap komponen mengenai *grand design* dan *road map* pembangunan jangka menengah di daerah.

Pemahaman penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah ketika suatu pemerintahan dapat dengan cepat dan tepat mencapai sasaran yang diinginkan serta perencanaan yang baik. Berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan

berasaskan pada prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitas untuk mendorong Pemerintahan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kabupaten Pulau Morotai merupakan Kabupaten yang baru di Propinsi Maluku Utara, prospek pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai adalah pengembangan pariwisata dan perikanan sebagai sector unggulan, dikarenakan Potensi pariwisata yang di miliki sangatlah beragam mulai dari Wisata bahari, Wisata History dan Wisata Budaya. Pemkab Pulau Morotai mempunyai prospek yang cukup menjanjikan untuk meningkatkan daya saing baik di level daerah, pusat bahkan internasional. Untuk itu haruslah didukung dengan bentuk pengelolaan yang baik. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai perumus kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan dan penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Pulau Morotai. Maka dari itu, adapun bentuk perencanaan pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 11. Rencana Kerja Disparbud Kab. Pulau Morotai

No	Program /Kegiatan	Indicator Program Hasil
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran
2	Peningkatan sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3	Sumber daya aparatur	Peningkatan sumber daya aparatur
4	Peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja
5	Pengembangan pemasaran pariwisata : <ul style="list-style-type: none"> • Morotai Expo • Pameran Nasional Regional • Penyelenggaraan fesitfal dodola • Pemilihan jojaru ngongare • Rapat Kordinasi kemitraan pariwisata • Peningkatan pemanfaatan iptek pariwisata.dst 	Meningkatnya pelayanan informasi dan promosi pariwisata
6	Pengembangan destinasi wisata : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata unggul (dodola,sum-sum, air kaca, galo-galo kecil,tabailenge) • Pendataan obyek wisata alam dan minat khusus • Kordinasi di kementrian terkait. dst 	Terciptanya destinasi pariwisata yang berdaya saing
7	Pengelolaan kekayaan budaya dan keragaman budaya : <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan benda-benda peninggalan PD II • Pengelolaan museum • Sanggar seni budaya • Festifal gita bahana nusantara • Festifal morotai 2013 • Monev pelaporan budaya/sejarah 	Pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan warisan budaya

Sumber Renja Disparbud

Perencanaan merupakan suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendaki. Dari tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki program perencanaan dari masing-

masing bidang yang ada dalam lingkup Disparbud. Beragamnya program perencanaan tersebut diatas, tentunya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pariwisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.

Jadi Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal : yang pertama ialah penentuan pilhan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula Nitisastro (dalam Tjokroamidjojo1996;15). sebagai upaya untuk merealisasikan program tersebut, maka dibentuklah Ivent Pariwisata atau kalender pariwisata, yang dilakukan oleh Disparbud sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pariwisata. Adapun Ivent pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Ivent Pariwisata Disparbud Kab. Pulau Morotai

No	Jenis	Pelaksanaannya/Jangka Waktu	Lokasi
1	Sight Seing	Februari 2013	Daruba (Kab. Pulau Morotai)
2	Pemilihan Gita Bahana Nusantara	Agustus 2013	Disparbud
3	Pameran Nasional dan Regional	Desember	Daruba (Kab. Pulau Morotai)
4	Gebyar Wisata Budaya	Mei	Jakarta
5	Penyelenggaraan Festival Dodola	Oktober	Kab. Pulau Morotai
6	Pemilihan Jojaru dan Ngongare	Januari-Desember	Dsiparbud
7	Pemilihan Putra-Putri Bahari	Januari-Desember	2012-2013
8	Lomba Potret UnderWater	Desember	2012-2013
9	Pelatihan Pelaku Soefenir	Desember	2012-2013
10	Pembentukan Sangar Seni Budaya	Januari-Desember	2012-2013
11	Pemeliharaan Barang-barang peninggalan Sejarah	Januari-Desember	2012-2013
12	Festival Morotai	November	2012-2013
13	Pengadaan alat Musik Tradisional	Januari-Desember	2012-2013
14	Gita Bahana Nusantara	Januari	2012

Sumber. Renja Disparbud Kab. Pulau Morotai

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa Disparbud Kab. Pulau Morotai memiliki program rencana kerja sebagai bentuk pencapaian target dan hasil dalam rangka mendorong pembangunan pariwisata. Perencanaan pariwisata bila dilakukan dengan baik tentu akan memberikan manfaat dan dapat memperkecil semua efek yang tidak menguntungkan. Karena itu pentingnya perencanaan dalam pengembangan pariwisata sebagai suatu industri agar perkembangan industri pariwisata sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan mencapai sasaran yang dikehendaki, baik itu ditinjau dari segi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Revi Darra Selaku Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai

Program Perencanaan Disparbud telah maksimal, hal ini terlihat dari bentuk perencanaan yang sudah termuat dalam lembaran rencana kerja Disparbud. Tentunya diharapkan bahwa program tersebut dapat tercapai sesuai dengan target dan hasil yang telah ditentukan. Untuk itu kami selalu

berupaya semaksimal mungkin sehingga target pembangunan pariwisata di Kab. Pulau Morotai dapat tercapai. (wawancara pada hari senin 15/07/2013. Pukul 09.10. WIT)

Perencanaan yang dilakukan oleh Disparbud telah maksimal sesuai dengan pembacaan akan kebutuhan daerah. Karena pada hakikatnya perencanaan merupakan proses yang sistematis dengan mengambil suatu pilihan dari berbagai alternative. hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Waterston (dalam Conyers 1994;4) Perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Selain proses yang sistematis dengan mengambil suatu pilihan dari berbagai alternatif perencanaan didalamnya terdapat cara pencapaian tujuan tersebut dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan mengambil suatu pilihan dari berbagai alternatif.

Sehubungan dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai, maka ada beberapa kawasan pariwisata yang akan dikembangkan sebagai salah satu kawasan yang potensial maka diperlukan perencanaan tata ruangnya secara sinergis atau terpadu. Untuk itu Disprabud telah membuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah (RIPPDA). Rencana Induk Pengembangan Pariwisata ini, merupakan salah satu program kendali ("Payung") pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pulau Morotai, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai mempunyai acuan dalam pengembangan sektor pariwisata maupun program investasi dimasa depan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Revi Dara selaku Kepala Disparbud Kab. Pulau Morotai, sebagai berikut :

Tentunya dalam rangka untuk mendorong pengembangan pariwisata haruslah memiliki perencanaan sebagai arah dan tujuan pembangunan. Walaupun saat ini DPRD belum membentuk perda yang mengatur tentang kepariwisataan, namun kami telah membuat RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) sebagai kendali pengembangan pariwisata Kabupaten Pulau Morotai kedepan. **(Wawancara pada hari Senin 15/07/2013. Pukul 10.30. WIT di Kantor Disparbud)**

Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai memiliki perencanaan sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu Disparbud telah membuat RIPPDA sebagai program kendali pengembangan demi terwujudnya pembangunan pariwisata. Perencanaan Pariwisata perlu dikerjakan setahap demi setahap menurut cara-cara yang sistematis. Hal ini dikarenakan aktifitas yang kompleks, sehingga haruslah melalui pertimbangan-pertimbangan mengenai banyak factor, antara lain di bidang sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Perencanaan pariwisata harus diintegrasikan dengan perencanaan dan pengembangan secara keseluruhan, supaya perencanaan pengembangan pariwisata benar-benar efektif, sehingga keseimbangan pembangunan dapai dicapai dan pertahankan. Menurut Oka A. Yoeti (dalam Muljadi, 2009;68) bahwa pertumbuhan kepariwisataan yang tidak terkendali sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik, pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik dan tentunya akan tidak menguntungkan semua pihak.

Pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan pengembangan daerah secara keseluruhan akan berdampak pada

berkembangnya potensi pariwisata di daerah. Secara umum, perencanaan pariwisata diperlukan karena berbagai alasan, diantaranya :

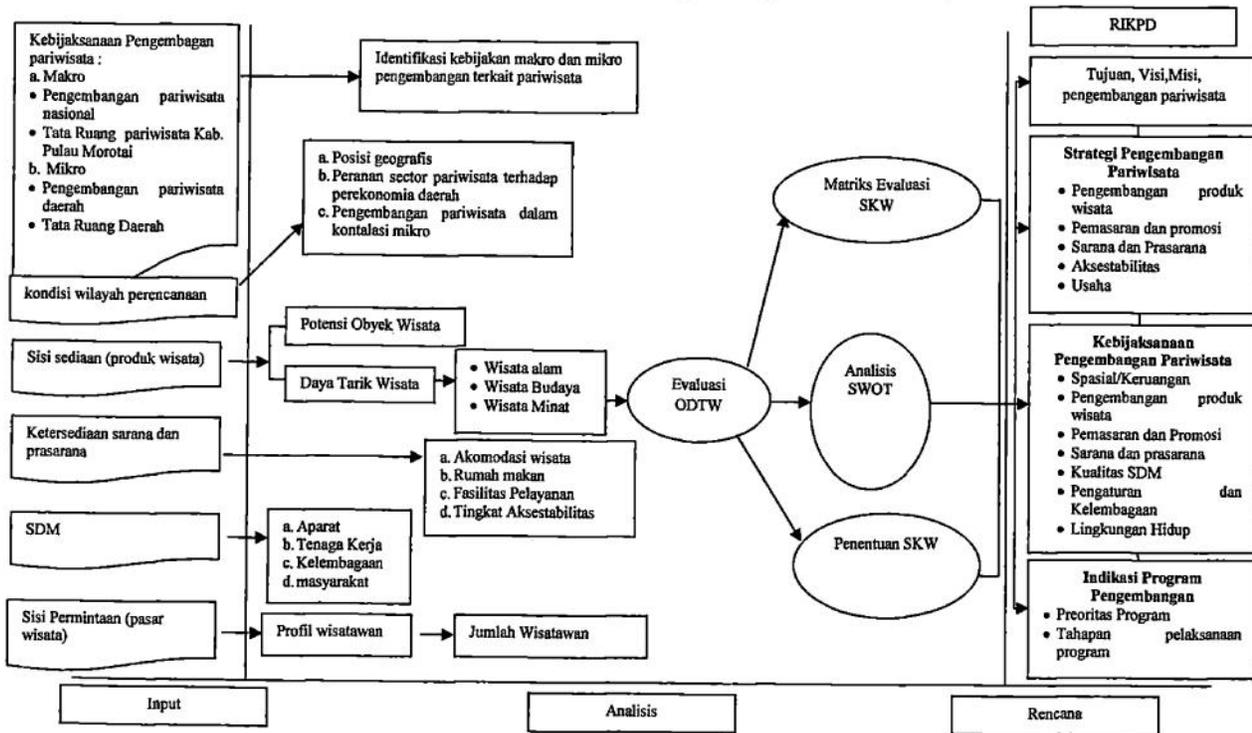
- a. Pariwisata modern merupakan suatu kegiatan yang relatif baru bagi sebagian besar daerah, dan umumnya mereka tidak memiliki pengalaman untuk mengembangkan dengan baik dan tepat. Sebuah rencana induk yang menyeluruh dan terpadu, dapat memberikan arahan kepada daerah untuk melakukan langkah-langkah pengembangan ini.
- b. Pariwisata adalah sangat kompleks, multi sektor dan melibatkan berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, industri, perikanan, komponen rekreasi dan lain-lain.
- c. Perencanaan pariwisata mengorganisasi komponen-komponen tersebut sehingga dalam pengembangan yang dilakukan dapat terintegrasi dengan baik, bukan sebagai bagian yang terpisahkan atau parsial.
- d. Pariwisata akan menimbulkan dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membutuhkan perencanaan yang terintegrasi. (RIPPDA Kabupaten Pulau Morotai)

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka disusunlah suatu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pulau Morotai sebagai suatu proses sistematis dengan tahapan-tahapan tertentu. Tujuannya adalah menjadikan RIPPDA sebagai pedoman bagi seluruh instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai yang meliputi :

- a. Memberikan gambaran secara komprehensif mengenai seluruh potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, eksistensi, peluang pengembangan dan permasalahannya.
- b. Memberikan arahan tentang aturan-aturan yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengembangan pariwisata.
- c. Menjadi media bagi keterpaduan lintas sektoral guna melancarkan pelaksanaan pengembangan pariwisata khususnya dan Kabupaten Pulau Morotai umumnya.
- d. Membuka peluang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata yang akan berkorelasi positif dengan upaya pemberdayaan masyarakat.
- e. Memberikan arah kebijakan bagi sektor pariwisata terutama dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah serta penguatan kelembagaan di daerah dalam rangka otonomi daerah. (RIPPDA Kab. Pulau Morotai Tahun 2013)

Adapun alur perencanaan Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pulau Morotai (RIPPDA) dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 10. Alur Perencanaan Induk Pengembangan Kab. Pulau Morotai



Sasaran dari RIPDDA diarahkan pada beberapa hal diantaranya; Tujuan dan sasaran pengembangan kepariwisataan, Visi dan misi pengembangan kepariwisataan, Strategi pengembangan kepariwisataan, Kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengembangan kepariwisataan, Program pengembangan kepariwisataan yang terdiri dari program pokok (pengembangan produk dan pasar) dan program penunjang (program sektor lain yang menunjang pengembangan wisata). Selain itu, penyusunan RIPDDA juga memiliki arahan kebijakan program pengembangan dan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pulau Morotai yang meliputi program : Prioritas pengembangan kepariwisataan Pengembangan pemasaran dan promosi, Pengembangan produk wisata, Pengembangan sarana dan prasarana, Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan. Jadi pada dasarnya perencanaan memiliki Arti dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia.
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*macimum out put*) dengan dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

- d. Albert Waterston menyebutkan perencanaan pembangunan adalah "melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.
- e. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekoomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efeisian dan efektif. Tjokroamidjoyo (1996;12)

V.1.2. Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kab. Pulau Morotai

Pariwisata merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan wilayah regional dan nasional, karena pariwisata mencakup dan terkait dengan sektor lain seperti: kondisi politik, kamtibnas, telekomunikasi, perdagangan, dan industri serta sektor lainnya. Secara sederhana, kelembagaan diartikan sebagai totalitas unsur-unsur dari system kepariwisataan yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perlunya kelembagaan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pulau Morotai antara lain adalah Adanya keterpaduan semua unsur pariwisata ke dalam satuan yang bersifat holistic, adanya kelembagaan yang kokoh akan meningkatkan efektivitas pemasaran produk wisata, untuk menjamin kemampuan setiap daerah menjadi bagian integral dari industry pariwisata, pengembangan *image* pariwisata relatif lebih mudah dilakukan oleh suatu mekanisme yang melibatkan banyak actor, pencapaian tujuan relatif lebih mudah untuk dicapai apabila beberapa kelompok sepakat dalam bekerjasama di dalam wadah kelembagaan, dan wadah

kelembagaan dapat dibangun suatu identitas wisata daerah (Ripdda Kab. Pulau Morotai).

Secara umum, strategi pengembangan kelembagaan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pulau Morotai adalah :

- a. Memadukan semua unsur kelembagaan pariwisata ke dalam satuan yang bersifat holistik.
- b. Memperkuat kelembagaan lokal yang ada.
- c. Merintis kelembagaan yang berorientasi ke tingkat propinsi, nasional dan internasional.

Arahan pengembangan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Pulau Morotai diarahkan agar memenuhi unsur-unsur pokok kelembagaan dalam pariwisata yang terdiri dari instansi pemerintah (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa), masyarakat dan LSM, industri/bisnis, instansi pendidikan, dan media massa. Dimana institusi pemerintah berfungsi sebagai fasilitator untuk menyusun kebijakan dan regulasi pengembangan pariwisata yang akan diisi dengan program-program kegiatan oleh unsur kelembagaan yang lain. Masyarakat dan LSM berfungsi sebagai aktor yang menyediakan jasa melalui berbagai atraksi wisata. Industri/kalangan pebisnis berfungsi sebagai aktor yang menyelenggarakan aktivitas wisata, *package* (pemaketan) dan pemasaran produk wisata. Adapun institusi pendidikan dan pelatihan berfungsi sebagai unsur yang menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan industry pariwisata. Sedangkan media massa berfungsi sebagai promotor sekaligus *disseminator* informasi produk wisata. Secara diagramatis unsur-unsur pokok

kelembagaan pariwisata yang diarahkan dalam pengembangan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Pulau Morotai dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 11. Unsur-unsur Pokok Kelembagaan Pariwisata Kab. Pulau Morotai



Sumber RIPDDA Kab. Pulau Morotai

Pemerintah dengan segala keterbatasannya tidak dapat melakukan sendiri dalam pengembangan industri pariwisata karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pemerintah baik itu dalam bidang kapital atau modal, sumber daya manusia (SDM) ataupun bidang manajemennya. Dengan demikian pemerintah harus melakukan kerja sama atau bermitra dengan aktor lain yaitu sektor privat (swasta) maupun masyarakat. Masyarakat akan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pengembangan kepariwisataan, serta dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab sebagai pelaku dan penentu

pengembangan kepariwisataan utamanya dalam skala lokal. Berikut wawancara dengan Bapak Jainal Wahab selaku ketua pengrajin Besi Putih.

Sampai saat ini kami merasa tidak pernah di kordinasi oleh Dinas Pariwisata terkait dengan pemberdayaan kerajinan tangan masyarakat lokal sebagai rangkaian dari pengembangan pariwisata, seharusnya dinas pariwisata harus bekerja sama dengan kami, sehingga kami merasa memberikan kontribusi terhadap pembangunan didaerah. (Wawancara pada hari Senin 15/07/2013. Pukul 16.00 WIT di Lokasi pengelolaan Besi Putih).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya koordinasi dari Disparbud kepada Masyarakat pengrajin besi putih sebagai rangkaian dari pembangunan pariwisata. Karena pariwisata merupakan suatu sektor yang kompleks yang juga melibatkan industry-industri klasik, seperti kerajinan tangan dan cinderamata serta usaha-usaha penginapan, restoran dan transportasi (Pendit 1990). Pada dasarnya kebijakan sektor pariwisata merupakan kebijakan pembangunan yang tidak dapat dilepaskan dari isu pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal (pelaku usaha wisata). Karena pengembangan pariwisata harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan, lebih spesifik lagi pengembangan pariwisata harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal diimplementasikan dengan model partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk strategi perencanaan pariwisata. Pada dasarnya kebutuhan kemitraan dengan melibatkan negara, swasta dan lembaga social kemasyarakatan menjadi kebutuhan yang urgen bagi pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, berikut adalah wawancara dengan Bapak Jeti Abd Asis selaku manager pengelola Resor Jababeba.

Kabupaten Pulau Morotai memiliki potensi yang sangat luar biasa, selain daerahnya yang strategis (berada di bibir pasifik), morotai juga sangat beragam keunggulan SDA dan pariwisata. dengan dasar inilah, maka menarik untuk kami dalam menanam modal (investasi) di daerah ini. Namun keunggulan tersebut tidak dibarengi dengan kondisi keamanan daerah. Saat ini yang terjadi bahkan pihak Pemkab melakukan pengusiran terhadap salah satu pihak perusahaan MMC. Dari problem tersebut, berdampak koletif terhadap para infestor lain yang mau menanam saham di daerah ini karena merasa tidak aman. Untuk itu perlu kiranya pemerintah daerah harus berbenah diri sehingga citra baik Kab. Pulau Morotai terbentuk. (Wawancara pada hari Senin 15/07/2013. Pukul 20.00 WIT di Kediaman)

Dalam posisi seperti ini, kebijakan sangat bermakna, tidak saja sebagai fungsi regulatif tetapi juga fungsi strategis dalam hubungan nasional bahkan internasional. Dengan demikian, maka kebijakan pengembangan pariwisata tidak dapat dianalisis tanpa mengkaitkan dengan kepentingan kemitraan antar pemerintah, bisnis dan masyarakat. Kebijakan kelembagaan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta, merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan dan aturan aturan yang telah disepakati antar berbagai pihak yang bermitra. Dan kemitraan ini dikembangkan dalam kerangka kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang bermitra ini.

Dalam rangka untuk mendorong pembangunan pariwisata di daerah dibutuhkan bersinergitas dari semua elemen tidak terkecuali DPRD Kab. Pulau Morotai seperti yang telah digambarkan diatas. Berikut wawancara dengan Bapak Fachri Khaerudin salah satu anggota DPRD Kab. Pulau Morotai.

Tentunya DPRD selalu berupaya menyukseskan pembangunan di daerah dalam artian bahwa kami membuat prodak hukum yang berkualitas dan pro terhadap kebutuhan daerah. Namun Saat ini DPRD berkonsentrasi dalam menyelesaikan konflik tanah antara militer dan masyarakat. Jadi terkait

dengan perda tentang pariwisata, pengelolaan harga pasar dll kami tidak terlalu focus. (Wawancara pada hari Kamis 25/07/2013. Pukul 13.30 WIT)

Dari wawancara tersebut, menunjukkan bahwa DPRD Kab. Pulau Morotai yang berfungsi sebagai fasilitator untuk menyusun kebijakan dan regulasi justru menganggap bahwa produk hukum terkait dengan pariwisata dan pendukungnya (retribusi pajak hotel, parkir, tempat wisata dll) tidak terlalu penting. Sehingga 20 (duapuluh) anggota DPRD Kab. Pulau Morotai lebih berkonsentrasi pada penyelesaian konflik tanah antara militer dan masyarakat. Sejauh ini, dari hasil pengamatan lapangan ditemukan bahwa penyelesaian konflik tanah telah menguras biaya, energy dan waktu yang cukup lama mulai transisi politik dari Halmahera Utara ke Morotai dan bahkan sampai sekarang belum ada kejelasannya. Persoalan lain yang tak kalah penting dan diakui oleh pemerintah Kab. Pulau Morotai adalah mekanisme pasar yang liberal tanpa batas dan globalisasi. Mekanisme pasar yang liberal tidak dapat diandalkan untuk membuat kenyamanan wisatawan. Bahkan tidak jarang, membuahkan krisis keuangan yang berdampak luas menyengsarakan masyarakat lokal bahkan wisatawan. Mekanisme pasar bebas sulit dijinakkan oleh konstitusi dan regulasi. Kenyataannya eksploitasi pasar menelikung masuk dalam sendi-sendi tanpa tekecuali. Jadi sudah seharusnya tugas dari DPRD mampu menetralsir kebutuhan pariwisata dan fenomena tersebut. Berikut wawancara dengan Ali Sangadji selaku Ketua DPRD Kab. Pulau Morotai.

DPRD Kab. Pulau Morotai telah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat produk hukum yang berkualitas di daerah, dan sejauh ini sudah 7 (tujuh) perda yang sudah dibuat, kami mengakui memang bahwa masih minim produk hukum di daerah, namun kami selalu berbenah diri dan

berupaya semaksimal mungkin demi konstituen kami. (Wawancara pada hari Kamis 25/07/2013. Pukul 15.00 WIT)

Ternyata ketika ditelusuri lebih dalam ditemukan bahwa sebagian besar anggota DPRD Kab. Pulau Morotai kurang optimal Kinerjanya, karena sampai saat ini hanya 7 (tujuh) prodak hukum yang dibuat didaerah sehingga berakibat kepada carut marutnya kebijakan pengelolaan factor-faktor pendukung pariwisata diantaranya harga pasar (kebutuhan Sembilan bahan pokok), angkutan, perhotelan dll terasa begitu mahal. Jadi asumsinya DPRD kurang optimal kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya (dalam membuat prodak hukum didaerah yang berkualitas), hal ini mungkin disebabkan karena *euforia* kabupaten baru yang pada akhirnya agregasi dan artikulasi kepentingan hanya beroentasi pada keluarga, suku, kerabat dll tanpa memandang kualitas dari Kandidat, sehingga berdampak pada melemahnya fungsi legislasi didaerah. Seharusnya optimalisasi fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan arah ke depan terbentuknya postur, dan model (*prototype*) Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan karakteristik di daerah.

Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai haruslah bersinergi dari semua elemen, baik dalam pembuat kebijakan, SKPD sampai kepada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab penuh dari dinas terkait saja. Hubungan kelembagaan pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif/DPRD) harus lebih fungsional guna memantapkan fungsi (legislasi, pengawasan dan budgeting). Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi secara

efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi. Akan tetapi, pada kenyataannya terjadi *konflik interest* di tingkat para pengambil keputusan.

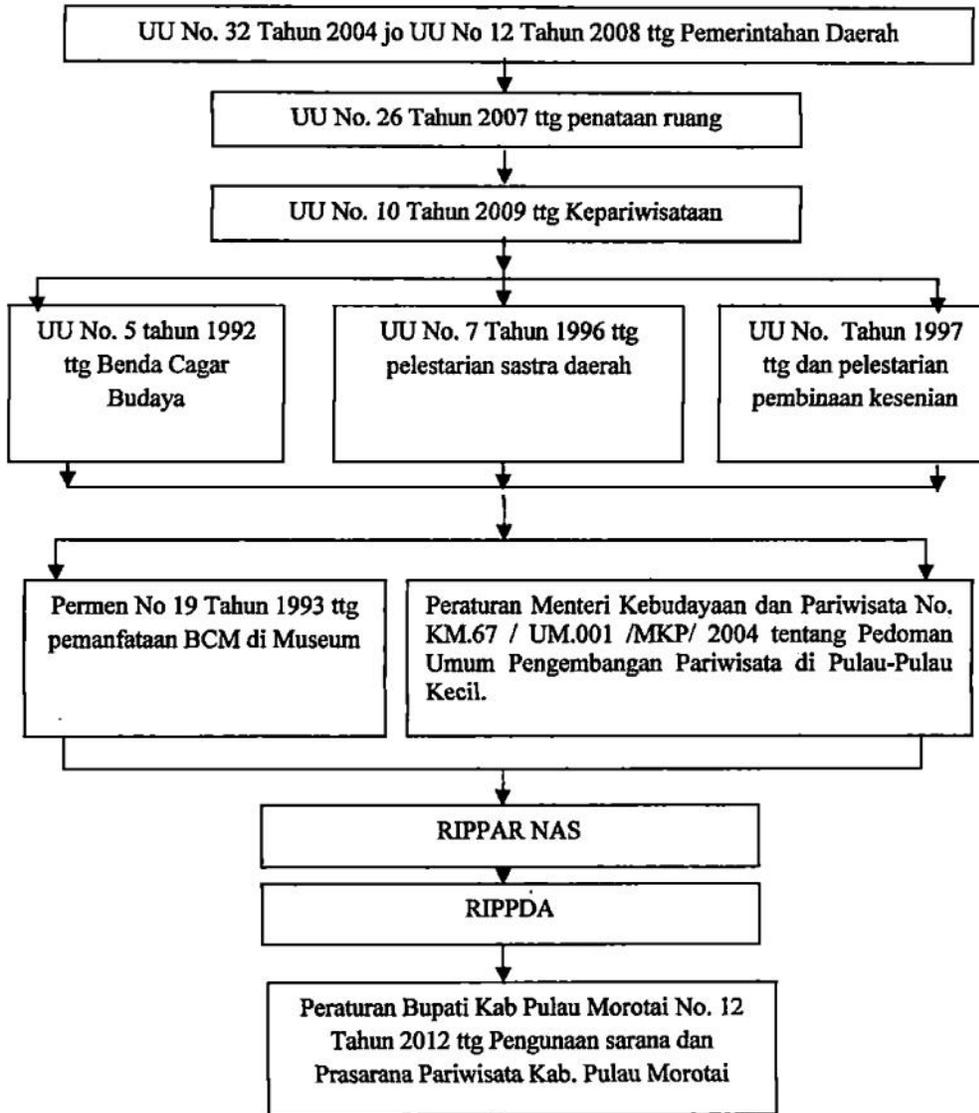
Pada dasarnya koordinasi pemerintah swasta dan masyarakat haruslah berjalan baik dan berkualitas. Langkah demikian selain untuk menjamin proses perencanaan pembangunan, sampai pelaksanaan dan evaluasi. yang terpenting memberikan kepastian berusaha dan suasana yang nyaman untuk pengusaha dan investor serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Edgell, dkk (2008) yang mengemukakan bahwa kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan berikut ini *'Tourism policy is a progressive course of actions, guidelines, directives, principles, and procedures set in an ethical framework that is issues-focused and best represents the intent of a community (or nation) to effectively meet its planning, development, product, service, marketing, and sustainability goals and objectives for the future growth of tourism'*. Jadi pada dasarnya Kebijakan pembangunan bidang pariwisata diarahkan pada :

- a. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara instansi dan pelaku industri pariwisata.
- b. Peningkatan kualitas dan intensitas promosi pariwisata.
- c. Pengembangan destinasi dan objek wisata.
- d. Peningkatan akses menuju objek, event dan paket wisata.

- e. Sosialisasi dalam rangka menumbuhkan apresiasi dan sadar wisata bagi masyarakat.
- f. Penyiapan sumber daya manusia yang profesional di bidang pariwisata.
- g. Kebijakan pembangunan budaya, dalam jangka panjang diarahkan untuk pengembangan suatu tatanan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang menghargai dan melestarikan identitas dan kearifan nilai budaya lokal sebagai bagian integral dari kepribadian nasional, serta memiliki kemampuan beradaptasi dan merespons setiap perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan informasi. Sedangkan dalam lima tahun kedepan pembangunan bidang kebudayaan terutama diarahkan pada :
 - a) Revitalisasi lembaga-lembaga adat agar berfungsi dan berperan dalam pembangunan masyarakat.
 - b) Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan daerah.
 - c) Mengelola, mengembangkan dan memperkenalkan peristiwa budaya, kesenian daerah, dan benda-benda budaya untuk dikemas sebagai objek wisata yang menarik untuk dijual. (RIPPDA Kab. Pulau Morotai).

Adapun alur dari landasan hukum kebijakan pembangunan Pariwisata Kab. Pulau Morotai dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 12. Landasan Hukum Pelaksanaan Pariwisata Kab. Pulau Morotai



Sumber RIPPDa Kab. Pulau Morotai

Berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja organisasi, maka pilihan mana yang akan dioptimalkan penanganannya, apakah pada sisi internal organisasi atau pada sisi eksternal organisasi, itu tergantung pada permasalahan yang dihadapi organisasi. Dalam teori kinerja organisasi, konsep kinerja selalu dikaitkan dengan

akuntabilitas yang berkenaan dengan *check and balance* kelembagaan dalam suatu administrasi. Istilah kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan sebagai penampilan unjuk kerja atau prestasi. Kinerja organisasi menurut Atkinson (dalam Siagian, 1997;73) akan menunjuk pada efektivitas organisasi, dimana hal itu akan menyangkut pengharapan untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan kebijakan. Isu efektivitas organisasi dalam kaitannya dengan kinerja organisasi, menurut Roberts dan Jakson (2002;120) mencakup *how well the organization is doing*, bagaimana suatu organisasi mencapai profit tujuannya dan tingkat kepuasan dari para pelanggan/pengguna jasa pelayanannya.

V.1.3.Target dan Realisasi Program Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai

Pariwisata merupakan aktivitas atau rangkaian aktivitiitas yang berhubungan dengan hampir seluruh sektor jasa/tersier daerah, seperti sektor perdagangan, hotel & restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, perusahaan dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan. Dengan demikian, perkembangan sektor pariwisata di daerah ini memerlukan suatu sinergitas kebijakan lintas sektoral guna mencapai target-target utama pembangunan pariwisata daerah.

Bertolak pada karakter aktivitas tersebut, maka pembangunan bidang pariwisata Kabupaten Pulau Morotai selama lima tahun ke depan akan diarahkan pada penciptaan aktivitas pariwisata bernilai ekonomis tinggi melalui peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana, promosi wisata, dan peningkatan

investasi sektor swasta terutama pada aktivitas pariwisata bahari, budaya, dan sejarah. Dengan langkah kebijakan dan pola investasi tersebut, jumlah kunjungan wisata pada 2015 diprediksi dapat mencapai angka 5000 orang, terdiri dari 1.500 wisatwan asing, dan 3.500 wisatawan domestik dengan rata-tata lama kunjungan 5 hari untuk wisatawan asing dan 7 hari untuk wisatawan domestik. Capaian target sasaran tersebut akan didukung dengan peningkatan investasi swasta pada sektor perhotelan yang termanifestasi pada jumlah hotel dan penginapan masing-masing sebanyak 3 dan 10 buah. Berikut adalah tabel target pembangunan pariwisata yang ingin di capai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.

Tabel 13. Target Pembangunan Bidang Pariwisata

No	Bidang/Indikator	Kondisi Awal		Sasaran/ Target		
		2009	2010	2011	2016	Rerata
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Jumlah Hotel		0		3	
2	Jumlah Wisma/Penginapan		8		15	
3	Jumlah Wisatawan Asing				1.500	
4	Jumlah Wisatawan Domestik				3.500	
5	Lama kunjungan wisman (hari)				5	
6	Lama kunjungan wisdom (hari)				7	

Sumber RPJMD Kab. Pulau Morotai

Seperti yang sudah diuraikan pada Bab Sebelumnya, bahwa target dari Dinas Pariwisata dalam upaya untuk mengembangkan potensi wisata sesuai dengan Visi dan Misi dari Disparbud yaitu Mendorong peningkatan citra Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah tujuan wisata berkelas dunia, berdaya

saing dan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar ada Peningkatan daya saing kepariwisataan Kabupaten Pulau Morotai dengan kabupaten lain yang ada di Propinsi Maluku Utara bahkan pada skala nasional sekalipun dapat tercapai. Dalam upaya untuk mendorong Tereksposnya potensi-potensi pariwisata lokal spesifik dan dominan guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan menumbuh kembangkan investasi yang ada di daerah. Artinya dengan adanya investasi di daerah, pengembangan kepariwisataan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; serta mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui perluasan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun target atau sasaran dari Disparbud yang tertuang dalam Laporan akuntabilitas instansi pemerintahan Dinas Pariwisata dan kebudayaan memuat 4 (empat) sasaran yang ingin di capai yaitu diantaranya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya 10 event pariwisata tahunan, terlaksananya 5 paket wisata, tercapainya jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 35.000 orang maupun mancanegara sebanyak 1.000 orang pada tahun 2016, pengembangan KSP Wisata Budaya Desa Adat, pengembangan KSP Wisata Budaya Desa Seni, pengembangan KSP Wisata Budaya Situs Sejarah, pengembangan Wisata Alam pantai, pengembangan KSP Wisata Alam, dan pengembangan wisata kuliner.
- b. Tercapainya peningkatan kualitas promosi potensi pariwisata daerah baik untuk kebutuhan sebagai tujuan wisata maupun sebagai tujuan investasi;

- c. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur dan pelaku usaha wisata yang profesional serta partisipasi masyarakat bagi pengembangan pariwisata daerah;
- d. Terwujudnya revitalisasi institusi adat serta peningkatan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan seni dan budaya daerah sebagai aset sekaligus terselenggaranya event-event budaya yang berkualitas dan dikemas sebagai atraksi wisata yang mempunyai nilai jual bagi pengembangan pariwisata daerah; (Sumber Lakip Kab. Pulau Morotai)

Disparbud Kab. Pulau memiliki target pencapaian yang itu diukur dari indicator kinerja dari dinas tersebut sebagai upaya untuk merealisasi program kerja yang ditetapkan pada RIPDDA dan Renja yang pada *endingnya* dapat menumbuhkembangkan pembangunan pariwisata yang ada di Pulau Morotai sebagai ujung tombak pendapatan daerah. Berikut adalah tabel dari target dan sasaran yang ingin dicapai dari Disparbud kab. Pulau Morotai.

Tabel 14. Target dari Disparbud Kab. Pulau Morotai Tahun 2013

Target/ Sasaran yang ingin dicapai Oleh Disparbud Kabupaten Pulau Morotai			
Tersedianya paket wisata yang menarik	Meningkatnya PAD sector pariwisata	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan disparbud	Terwujudnya penetapan dan pengelolaan terpadu cagar budaya
Terlaksananya ivent pariwisata tahunan	Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata	Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur da pelaku usaha wisata yang profesional	Terwujudnya revitalisasi museum

Meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang aman dan nyaman	Berkembangnya usaha, industry, dan investasi pariwisata	Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang pariwisata dan kebudayaan	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya
Tereksposnya potensi-potensi pariwisata lokal spesifik dan dominan guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan investasi	Terlaksanannya pengembangan pariwisata secara berhasilguna dan berdaya guna, terarah dan terpadu dengan tetap mengedepankan sapa pesona dalam pelaksanaannya		Meningkatnya bantuan fasilitas sarana seni budaya
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara maupun mancanegara	meningkatkan keterlibatan stakeholder pariwisata dalam memasarkan Kab. Pulau Morotai	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industry masyarakat bidang kepariwisataan dan kebudayaan	Meningkatnya kreatifitas dan produktifitas para pelaku budaya

Sumber Renstra Disparbud

Organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan bekerjasama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Sebuah organisasi harus menyediakan *direction framework* (kerangka kerja arahan) sebagai panduan kegiatan atau proyek dan dasar pengambilan keputusan organisasi. Dengan *direction organisasi* tersebut, organisasi bisa menilai apakah kegiatan-kegiatan organisasi telah dilaksanakan dengan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Semua keputusan harus dapat dievaluasi untuk menentukan kesesuaiannya dengan kerangka kerja tersebut. *Direction Framework* yang harus disediakan oleh organisasi meliputi : visi, misi, strategi, prinsip, klien/pelanggan/pengguna, stakeholder, tujuan, sasaran, produk atau jasa, *roles, responsibility and skills*. (Mahsun 2006;1).

Kabupaten Pulau Morotai merupakan Daerah kepulauan yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang kaya dan beragam. Kekayaan dan keragaman

alam dan budaya tersebut merupakan modal dasar dalam pembangunan Daerah ini. Dengan keberagaman sumber daya alam yang dimiliki seperti potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Namun begitu beragamnya sektor pariwisata di Pulau Morotai, belum memberikan peran yang signifikan dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terlihat dari kontribusi jasa pariwisata sebagai berikut :

Tabel 15. Kontribusi sector pariwisata pada PAD Kab. Pulau Morotai

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Retribusi usaha (jasa, penginapan, pengsakhahan, dan vila)	25.000.000.-	16.000.000.-
Pajak (hotel dan restoran)	817.773.000	415.457.000

Sumber Lakip 2013 Disparbud Kab. Pulau Morotai

Dari tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa sector pariwisata belum memberikan andil penuh dalam pendapatan daerah, yang tercermin dari sector-sector pendukung diantaranya perhotelan dan usaha jasa lainnya karena terlihat dari target dan realisasi masih jauh dari kebutuhan dan tuntutan, Selain itu juga terdapat pungutan jasa usaha yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Pendapatan Disparbud Kab. Pulau Morotai

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	Pungutan Jasa Usaha Pariwisata	4.130.000.-
2	Pungutan Jasa Usaha Pariwisata	3.465.000.-
Jumlah		7.595.000.-

Sumber Laporan Akuntabilitas 2013 Disparbud Kab. Pulau Morotai

Sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangannya, Disparbud memiliki anggaran pendapatan sebesar Rp 35.000.000.- dan disetorkan sesuai dengan tabel diatas, sisanya untuk belanja keperluan administrasi perkantoran. Namun Dari Tabel tersebut, dapat dibandingkan bahwa target dan sasaran dari Disparbud seperti yang sudah diuraikan pada tabel sebelumnya, memberikan gambaran bahwa pendapatan daerah dari segi pariwisata masih minim, ini menunjukkan bahwa Kinerja dari Disparbud Kab. Pulau Morotai kurang Optimal dalam mengembangkan potensi dan obyek wisata yang ada. Berikut wawancara dengan bapak Revi Darra selaku Kadis Disparbud Kabupaten Pulau Morotai

Target dan pencapaian yang dilakukan sampai saat ini memang masih jauh dari apa yang diharapkan, namun perlu disadari bahwa untuk mendorong pembangunan pariwisata tidak serta merta langsung berkembang, itu semua butuh proses dan waktu apalagi morotai masih belia. belum lagi mau menarik investor untuk masuk. saat ini Kab. Pulau Morotai diperhadapkan dengan isu yang berkembang bahwa pemerintah menolak untuk infestor menanam sahamnya didaerah tercermin dari kasus perusahaan MMC dan Pemkab. Sehingga kesemuanya itu berdampak pada target pencapaian yang diharapkan. (Wawancara, pada hari senin 15/07/2013. Pukul 15.00.WIT)

Pencapaian kinerja dari Disparbud kurang optimal. Karena tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran/target belum maksimal. Penilaiannya terletak pada program kerja yang

sudah ditetapkan belum dilaksanakan secara keseluruhan. Sehingga target-target tertentu yang sudah diderivasi dari tujuan organisasi. Pamungkas (dalam Juliantara,2005;38) menyatakan bahwa Kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja. Sejalan dengan itu, apa yang disampaikan oleh Mahsun (2006;25) bahwa kinerja (*performance*) sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Jadi dapat ditarik benang merahnya bahwa upaya target pencapaian yang dilakukan oleh Disparbud Kab. Pulau Morotai dalam melaksanakan kegiatan atau program yang tertuang dalam perencanaan pariwisata Disparbud belum mampu terealisasi dalam pelaksanaannya sehingga target yang diharapkan masih jauh.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 2013 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD. Realisasi capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Tahun 2013 tidak dapat tercapai seluruhnya sesuai target RPJMD karena faktor eksternal terutama :

- a. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DPA,) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan

anggaran. Revisi anggaran DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2013 terdiri atas revisi RKA sebanyak 1 kali, revisi DPA sebanyak 1 kali

- b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2013 baru sebanyak 30 orang atau 30 persen dari kebutuhan.
- c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi. Sebagai contoh, Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum tersedia (belum ada kantor tetap dalam hal ini masih kontrak rumah), jumlah kendaraan operasional, gedung/kantor ruang kerja, ruang rapat dan gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara masih terbatas.

Capaian kinerja Program/Kegiatan belum dapat tercapai seluruhnya. Pengaruh negatif yang paling utama adalah memperlambat perkembangan perekonomian makro Pulau Morotai. Anggaran belanja Dinas Pariwisata dan kebudayaan. 2013 semuanya sebesar Rp.3.348.909.532 Belanja Tidak Langsung Rp. 4,14.809.532 dan Belanja Langsung Rp. 2.934.100. 000 Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Bidang Pariwisata (Sped Boat, Kamar. Cottage. Jet sky, Bilyard, Biaya masuk objek wisata sebesar Rp. 7.120.000.-Realisasi serapan yang dipergunakan menurut perhitungan pada akhir T.A. 2013 adalah sebesar Rp. 4432.437.951.47 (90.60 %) dengan perincian Belanja Tidak Langsung Rp. 414.809.532 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.934.100. 000 sehingga terdapat Sisa anggaran

sebesar Rp. 2.328.523.00 (9, 74 %) dan sisa/efisiensi anggaran tahun 2013 disetor kembali ke kas Daerah. Adapun realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pariwisata kab. Pulau Morotai, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan (Retribusi tempat rekreasi)	35.000.000.-	4.700.000.-
2	Belanja tidak langsung	4,14.809.532	4,14.809.532
3	Belanja Langsung	2.934.100. 000	2.934.100. 000
Jumlah Belanja Surplus		4.434.766.474.47	

Sumber Laporan akuntabilitas Disparbud

Dari data diatas menunjukkan bahwa target dan dan hasil belum lah sejalan, dan sesuai dengan realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Disparbud Kab. Pulau Morotai belum mampu mengelola potensi dan obyek pariwisata yang sudah ditargetkan, ditunjukkan dari beberapa obyek wisata yang belum terurus dan terbengkalai, serta belum adanya asas transparansi dari Diparbud (data-data). Mengingat bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh factor input, dan proses manajemen dalam organisasi, maka upaya peningkatan kinerja organisasi juga terkait erat dengan peningkatan kualitas factor input dan kualitas proses manajemen dalam organisasi tersebut. kurang optimalnya kinerja dari Disparbud Kab Pulau Morotai, disebabkan juga dari kelalaian dan bermalas-malasan sebagian besar pegawai yang berada di Disparbud, serta masih minimnya spesifikasi dibidang pariwisata yang berakibat pada degradasi, pengelolaan yang

masih lemah. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Kepala Dinas pariwisata dan budaya :

Memang diakui bahwa sumberdaya manusia di Disparbud masih minim, dan belum optimalnya Kinerja dari Dispar yang kemudian berakibat pada tidak optimalnya pengelolaan potensi wisata yang sudah ada. Namun ini juga perlu dipahami, dikarenakan kabupaten ini baru berjalan defenitif 2 (dua) tahun, sehingga kami selalu melakukan pembenahan dan perbaikan kearah yang lebih baik. (Wawancara pada hari Senin 15/07/2013. Pukul 09.00.WIT)

Jadi Kendala-kendala umum yang menjadi faktor penghambat Kinerja dari Dinas pariwisata dan kebudayaan Kab. Pulau Morotai antara lain (a) minat para investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata khususnya dalam pembangunan obyek wisata masih rendah dikarenakan kondisi daerah yang tidak memungkinkan (bergejolak), (b) kondisi obyek wisata yang ada masih belum optimal, dengan kata lain masih ada yang belum memenuhi segi jumlah maupun kualitas standar fasilitas (fisik dan sarana) dan (c) pelaku pembangunan sektor kepariwisataan belum berperan secara optimal baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini sebagai akibat dari masih kurangnya sumber daya manusia pada sektor kepariwisataan dan pariwisata belum merupakan prioritas pembangunan ekonomi daerah.

Efektifitas organisasi secara internal mencakup efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dan factor-faktor hubungan manusia yang akan mempengaruhi produktifitas. Jadi pada dasarnya kinerja organisasi mempertanyakan apakah tujuan dan misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau factor ekonomi, politik, dan budaya yang ada atau tidak. Melihat dan cermati kondisi Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Pulau

Morotai seperti diuraikan di atas, maka sepatutnya Dinas Pariwisata berbenah diri dan penataan sistem kelembagaan (organisasi) dari kinerja Dinas Pariwisata untuk mengkoordinir aktivitas program pariwisata yang ada, sehingga arah pengembangan pariwisata menjadi semakin jelas dan berdaya guna. Keterlibatan semua elemen, Membuka partisipasi masyarakat dalam aktivitas pariwisata dan Pengadaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia unggul yang bekerja di sektor pariwisata ini.

Pada dasarnya Kinerja pembangunan Pariwisata yang baik bukan saja diperlukan sistem dan proses perencanaan yang baik, tetapi juga sistem dan proses pelaksanaan rencana yang baik pula. Persyaratan tersebut masih perlu dilengkapi dengan komitmen dan kompetensi segenap sumberdaya manusia yang berperan dalam sistem dan perencanaan pembangunan didaerah. Dalam rangka itu, maka perhatian ke masa depan perlu diarahkan secara lebih proposional terhadap dan/ antar unsur pembangunan pariwisata yaitu kebijakan program, kegiatan, anggaran dan berbagai regulasi yang menunjang peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas capaian kinerja. Oleh karena itu, operasionalisasi rencana kebijakan pembangunan pariwisata diberbagai bidang, sector dan wilayah, termasuk instrument pendukungnya perlu diperhatikan secara berimbang dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Seiring dengan hal tersebut, pelaporan kinerja dilakukan haruslah dengan mengacu pada prinsip dan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berasaskan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas serta disampaikan secara terbuka kepada public, agar mendapat

gambaran secara obyektif mengenai perkembangan kinerja pembangunan pariwisata secara utuh, Sehingga public dapat melihat keterkaitan dan konsistensi perumusan dan pelaksanaan visi, misi dan program kerja.

V.2. Pembangunan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Pulau Morotai

Dalam sub bab akan diuraikan mengenai jumlah kunjungan wisatawan tahun 2013 (wisatawan domestik maupun mancanegara), fasilitas pariwisata yaitu aksesstabilitas, transportasi infrastruktur tempat wisata, dll. Serta perkembangan obyek wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.

V.2.1. Kunjungan wisatawan Di Kab. Pulau Morotai

Pembangunan pada prinsipnya merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk menuju modernisasi dalam rangka mensejahterakan rakyat baik secara lahir maupun batin. Dalam pembangunan terjadi suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. Disinilah peran pemerintah harus lebih jeli menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki negara, untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, karena pada dasarnya pembangunan diselenggarakan oleh rakyat bersama pemerintah. Peranan masyarakat dalam pembangunan harus ditumbuhkan, dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan, bahwa hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh masyarakat, maka hasil hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Di Indonesia pembangunan dilaksanakan disegala bidang kehidupan. Karena

pembangunan pada dasarnya merupakan usaha nyata yang dilakukan untuk mengarah ke hal positif untuk menuju ke hal yang lebih baik (Aronsson 2000;31)

Pariwisata merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan. Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu dari rangkaian aktivitas perjalanan, dengan alasan rekreasi, mencari nafkah dan bahkan menghabiskan waktu senggang baik itu wisata mancanegara maupun wisata domestik. Tercatat di tahun 2013 lebih dari 96% dari semua pengunjung adalah wisatawan domestik. Data statistik yang tersedia tidak mencukupi untuk bisa menarik kesimpulan lebih jauh, khususnya yang sehubungan dengan maksud perjalanan para pengunjung. Nampak jelas bahwa sebagian besar pengunjung adalah untuk alasan bisnis, rapat, konferensi atau kunjungan keluarga dan hanya sedikit sebagai wisatawan liburan/plesiran, sayangnya jumlah tiap kelompok tidak bisa ditentukan. Selanjutnya juga tidak tersedia data tentang pengunjung yang bermalam di rumah keluarga atau kerabat.

Menurut Spilane (1993), pariwisata adalah “perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu”. Ditambah pula bahwa pariwisata terbagi atas beberapa jenis, yaitu: (1) pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*); (2) pariwisata untuk berekreasi (*recreation tourism*);

(3) pariwisata untuk budaya (*culture tourism*); (4) pariwisata untuk olah raga (*sport tourism*); (5) pariwisata untuk urusan usaha dagang (*business tourism*); dan (6) pariwisata untuk berkonvensi.

Meskipun liburan/plesiran bukan sebagai maksud utama perjalanan, namun bisa diasumsikan bahwa sebagian besar dari para pelaku perjalanan domestik juga mengunjungi tempat-tempat pariwisata dan memanfaatkan jasa-jasa pelayanan pariwisata. Umumnya, para wisatawan domestik lebih tertarik untuk berkunjung ke daerah objek wisata yang menjadi andalan Kabupaten Pulau Morotai seperti, Pulau Dodola, Pulau Sum-Sum, Air Kaca, Tank Amphibi, Museum Perang dunia II dan pantai-pantai yang memiliki panorama indah yang dimiliki Kabupaten Pulau Morotai. Namun Jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara masih dirasa sedikit. Hal ini dapat dilihat dari data pengunjung yang datang ke obyek Wisata Kabupaten Pulau Morotai.

Tabel 18. Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Tahun 2011-2013 Wisatawan	2011		2012		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Domestik	300	71,4	5.940	96,6	500	70,0
M mancanegara	120	28,6	500	3,4	300	30,0
Jumlah	420	100	6.149	100	800	100

Sumber Lakip Disparbud

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah kunjungan mulai dari domestik dan mancanegara dari tahun ke-tahun sifatnya fluktuatif, ditahun 2012 jumlah kunjungan meningkat, karena dilaksanakannya festival internasional yaitu Sail Morotai 2012 yang berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan, namun ditahun selanjutnya mengalami penurunan yang drastis. Dari hasil observasi

ditemukan bahwa ternyata hal ini disebabkan karena tidak adanya kenyamanan dari para wisatawan yang menyebabkan ditahun berikutnya tidak ada rasa ingin menikmati kembali potensi pariwisata di Kab. Pulau Morotai. Berikut wawancara dengan Bapak Arsyad Haya selaku wisatawan asal ternate.

Berkunjung di Pulau morotai merupakan kesenangan tersendiri, selain dapat menikmati panorama pantai dodola yang indah, keindahan dasar laut, peninggalan sejarah disajikan dan dikemas dengan cara yang berbeda serta atraksi budaya yang tentunya memberikan gambaran cerita masa lalu yang tersusupi dengan tarian-tarian tersebut. Akan tetapi, keindahan yang masih alami tersebut tidak di barengi dengan kesiapan fasilitas di daerah tempat wisata serta mahalnnya penginapan dan makanan. Saya menyesalkan Pemkab yang tidak mampu mengembangkan fasilitas ditempat-tempat wisata yang begitu beragam. (Wawancara pada hari Selasa 09/07/2013, pukul 16.00 WIT di pulau dodola salah satu daerah tempat wisata).

Jadi pada dasarnya wisatawan merasa jenuh dikarenakan mahalnnya factor penunjang pariwisata dalam hal biaya transportasi, makan penginapan, dan belum adanya kelengkapan penyediaan pariwisata. Di samping itu, industri perhotelan terlihat belum cukup terorganisir di Kabupaten Pulau Morotai dan bahkan belum ada sama sekali di beberapa kecamatan. Saat ini lebih dari 98% turis di wilayah Kabupaten Pulau Morotai adalah wisatawan lokal, orang Indonesia, dan expatriate yang tinggal di Indonesia dan lebih khususnya di Propinsi Maluku Utara. Padahal Pariwisata merupakan aktifitas, pelayanan dan produk hasil industry pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. McIntosh (dalam Muljadi, 2009;7) menyatakan bahwa pariwisata adalah *.....a composite of activities, serviced and industries that delivers a travel experience : transportation, accommodation, eating, and drinking establishment, shops,*

entertainment, activity and other hospitality service available for individuals or group that are away from home.

V.2.2. Fasilitas Pariwisata Di Kabupaten Pulau Morotai

Kepariwisataan digolongkan dalam sektor tersier yang meliputi sektor angkutan, fasilitas penginapan, jasa, dan perdagangan sebagai suatu industri karena pengelolaan yang profesional sudah mencakup berbagai aspek perekonomian yang saling berkaitan satu sama lainnya dimana nantinya akan dapat mendukung peningkatan produktivitas pembangunan ekonomi baik regional maupun nasional. Dengan Meningkatnya kunjungan wisatawan dan belanja wisatawan dapat berpengaruh kinerja perekonomian daerah, yaitu meningkatnya pendapatan sektorsektor ekonomi dan berkembangnya lapangan kerja. Hal ini disebabkan karena sebagai penghasil devisa sektor pariwisata dianggap sejajar dengan sektor ekspor yang dapat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah untuk itu diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penggunaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai sebagai bagian dari optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana pariwisata. hal sejalan dengan apa yang diutarakan Bapak Rusli Sibua selaku Bupati Kab. Pulau Morotai

Untuk mewujudkan program yang telah direncanakan, Pemkab telah menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 tentang penggunaan sarana dan prasarana. Tentunya diarahkan pada pembangunan dan peningkatan prasarana penunjang secara optimal di kawasan wisata dan factor pendukung pariwisata. . (Wawancara pada hari Selasa 09/07/2013, pukul 12.00 WIT).

Perkembangan pariwisata selain dicerminkan oleh meningkatnya kunjungan wisatawan baik yang berasal dari mancanegara dan dari dalam negeri, juga oleh

meningkatnya pendapatan yang dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu untuk akomodasi, konsumsi makanan, angkutan wisata atau jasa-jasa lainnya. Namun seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa belum ada peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD Kab. Pulau Morotai dalam rangka mengatur harga pasar, akomodasi dll maka berdampak pada segala aspek termasuk pada aspek pariwisata.

Fandeli (1995) mengemukakan bahwa “pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dijelaskan pula bahwa wisata merupakan suatu kegiatan bepergian dari suatu tempat ke tempat tujuan lain di luar tempat tinggalnya, dengan maksud bukan untuk mencari nafkah, melainkan untuk menciptakan kembali kesegaran baik fisik maupun psikis agar dapat berprestasi lagi.

Prasarana Kepariwisata merupakan semua fasilitas yang mendukung agar sarana pariwisata dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan guna memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam fasilitas pariwisata seperti Prasarana perhubungan, seperti jalan, terminal angkutan darat dan laut dan bandara udara, System perbankan dan Moneter, serta Telekomunikasi seperti telpon, internet, kantor pos, Tv dan radio serta pelayanan kesehatan dan keamanan. Jadi pada dasarnya Upaya untuk mendorong Pertumbuhan Pembangunan Pariwisata di Kab.Pulau Morotai, maka perlu disediakan sarana dan prasarana penunjang, sehingga wisatawan merasa nyaman dan ingin berlama-lama di daerah tersebut.

V.2.3. Perkembangan Obyek Wisata Di Kabupaten Pulau Morotai

V.2.3.1. Pulau Dodola dan Pulau Zum-Zum

Pulau Dodola Besar dan Kecil yang berada pada Kecamatan Morotai Selatan ini dapat ditempuh dari pelabuhan ferry Daruba atau pelabuhan H.M.S. Lastori selama lebih kurang 30 menit. Pantai ini sangat indah dan dengan pasir putih yang halus, memiliki panjang sekitar 16 km km. Pantai yang dilatarbelakangi oleh pepohonan kelapa ini, menampilkan pula laut yang jernih dan pemandangan indah serta adanya Pulau Dodola kecil yang pada saat surut dapat dilalui dengan berjalan kaki, menambah daya tarik pada pulau Dodola ini. Di pulau ini sudah tersedia fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk pariwisata seperti resort, penginapan dan dermaga, hanya saja kondisinya sudah tidak terurus dan terpelihara. Pulau Dodola merupakan pantai yang paling banyak diminati oleh pengunjung baik masyarakat Morotai sendiri maupun wisatawan Nusantara dan mancanegara. Berikut adalah gambar pesona keindahan dari pulau Dodola kecil dan besar yang dijadikan sentral pelaksanaan Sail 2012.

Gambar 13. Pulau Dodola Kecil dan Dodola besar



Sumber hasil Survey Lapangan 2013

Pulau Dodola merupakan tempat pengistirahatan Jendral sekutu Mac. Arthur ketika selesai melakukan perang. Selain pulau dodola, terdapat juga Pulau

Sumsum, Pulau ini merupakan pulau yang bersejarah dan terletak 3 mil di depan Kota Daruba. Sumsum adalah pulau kecil dengan panorama alam pantai pasir putih berkerikil. Jenderal Douglas Mc. Arthur, pemimpin pasukan sekutu untuk Kawasan Asia Pasifik pada masa Perang Dunia II pernah tinggal di pulau ini. Di pulau ini terdapat tugu monumen Jendral Mc Arthur sebagai tanda bahwa beliau pernah berada di pulau tersebut. Kondisi monumen Jendral Mc Arthur ini juga berada pada kondisi yang tidak terawat, bahkan plakat marmer yang menunjukkan keterangan monumen tersebut sudah hilang. Kondisi pulau ini tidak berpenghuni, sehingga yang menurut masyarakat bahwa di Pulau ini terdapat Goa Pusat Komando tempat Jendral Mc Arthur mengatur strategi melawan Jepang, dan tempat pendaratan Amphibi pasukan Sekutu sudah sulit ditemukan.

Gambar 14. Pulau Sum-Sum tempat pendaratan Jendral Mac Arthur



Sumber hasil Survey Lapangan 2013

V.2.3.2. Obyek Wisata Bahari

Wilayah Kabupaten Pulau Morotai memiliki potensi wisata alam bawah laut yang sangat potensial untuk diving. Dalam situs Resmi Peta Selam Indonesia Tahun 2009 – 2011, diinformasikan ada sekitar 28 titik (*point*) lokasi potensi diving di Kabupaten Morotai yang memiliki beraneka ragam biota laut yang tidak puas ketika dipandang mata seperti yang terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 15. Titik Lokasi Potensi Diving di Kabupaten Pulau Morotai

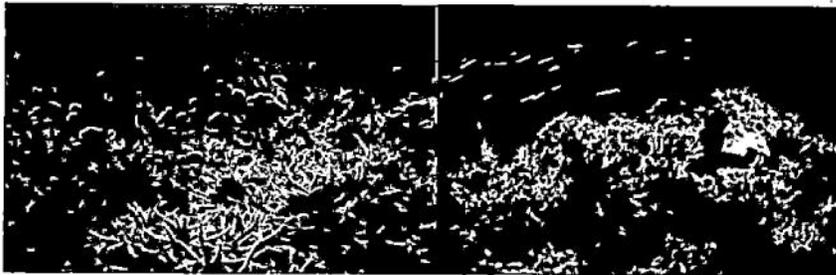


Sumber : Ripdda Kab. Pulau Morotai

Dari 28 titik lokasi tersebut terdapat beberapa tempat yang menjadi keunikan tersendiri yaitu dikarenakan keindahan dasar laut. Kawasan terumbu karang di Pulau Morotai sebagian besar terdapat di perairan laut Pulau Morotai sebelah barat, yakni di sekitar pulau-pulau kecil antara pulau ini dengan Pulau Halmahera. Pulau-pulau kecil tersebut antara lain Pulau Mitita Pulau Sumsu, Pulau Lunglung, Pulau Ruberube, Pulau Rukiruki, Pulau Bobongono, Pulau Kokoya, Pulau Kolorai, Pulau Dodola Kecil, Pulau Dodola Besar, Pulau Pelo, Pulau Galogalo Besar, Pulau Galogalo Kecil, Pulau Loleba Besar, dan Pulau Loleba Kecil, Pulau Ngelengele Besar, Pulau Ngelengele Kecil, Pulau Tuna (Pulau Burung), Pulau Kacuwawa dan Pulau Rao. Jenis terumbu karang yang

ditemukan di kawasan ini mencakup antara lain karang batu dari jenis *Acropora polifera*, *Acropora hyacinthus*, *Fungia sp.*, *Porites nigrecens* dan *Pocillophora verrucosa*, *Favites sp.*, *Porites lutea*, *Porites lutea* yang telah ditumbuhi oleh *turf algae*, *Porites nigrecens*, *Pectinia lactuca*, *Seriatophora caliendrum* serta *Stylphora pistillata*, *Pocillophora meandrina* *Halimeda sp.*, *Sunilaria sp.* Dan *Sarcophyton sp* dan *Favites abdita*. (RIPPDA Dinas pariwisata dan kebudayaan kab. Pulau morotai)

Gambar 16. Wisata dasar laut Di Kabupaten Pulau Morotai



Sumber Dokumentasi Disparbud Kab. Pulau Morotai

V.2.3.3. Obyek Wisata Sejarah dan Budaya di Kab.Pulau Morotai

Kabupaten Pulau Morotai yang tempo dulu adalah sebuah pulau kecil strategis yang pernah menjadi pangkalan militer Amerika Serikat dalam menyusun kekuatan semasa PD II. Sampai saat ini masih terdapat sisa-sisa PD II seperti puing-puing pesawat tempur, bangkai kapal perang, rongsokan tank, dan bunker tempat persembuyian tentara sekutu. Sejarah singkat pendaratan Mac Arthur, Pada tanggal 15 September 1944, tentara Sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Douglas Mc. Arthur mendarat di Morotai. Pada saat yang bersamaan ratusan kapal perang melakukan pendaratan laut pertama di tanjung Dehegila Morotai Selatan. Sejak itu Morotai dijadikan markas militer Sekutu. Setelah

menguasai Morotai pada tahun 1944, Tentara Sekutu dibawah komandan Jenderal Mc. Arthur mendirikan beberapa pangkalan di Morotai, diantaranya adalah pangkalan udara. Untuk mensuplai berbagai kebutuhan perang, pelabuhan Morotai dijadikan salah satu pelabuhan untuk berbagai kepentingan pasukan tentara Sekutu. Berbagai jenis kapal perang Amerika Serikat berlabuh di pelabuhan Daruba menjadikan Morotai saat itu sebagai kota pelabuhan militer terkenal di kawasan Asia Tenggara.

Gambar 17. Dokumentasi perang dunia ke II



Sumber dokumentasi Disparbud

Pada masa kini, banyak peninggalan tersebut yang telah hilang ataupun dijarah. Walaupun menurut beberapa narasumber, pulau Morotai sebagai bekas basis pangkalan Jepang maupun Sekutu masih banyak menyimpan peninggalan-peninggalan PD II yang masih belum terjamah dan diketemukan. Maka dari itu Morotai menjadi potensi tersendiri dalam pengembangan wisata sejarah dalam bentuk puing-puing hasil peninggalan PD II. Untuk itu potensi tersebut kiranya harus berupaya untuk dikembangkan (mengumpulkan) dalam rangka untuk mendorong pembangunan Pariwisata di Kab.Pulau Morotai. berikut adalah

wawancara dengan Bapak Hangewa selaku Kepala Bidang Pengembangan Sejarah dan Budaya Disparbud.

Menyangkut dengan Wisata sejarah, saat ini kami telah berupaya untuk mengumpulkan sisa-sisa PD II dalam bentuk bangkai pesawat, senjata dan peralatan perang lainnya, dan sejauh ini kami sudah mengumpulkan sebagian besar sisa-sisa perang tersebut yang telah dimuseumkan. (Wawancara pada hari jumat 5/07/2013. Pukul 11.01 WIT).

Disparbud Kab. Pulau Morotai telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari sisa-sisa PD untuk dimuseumkan sebagai bagian dari menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk melihat bukti-bukti peninggalan sejarah yang masih ada. Namun dari hasil pengamatan dilapangan, ditemukan beberapa keganjalan, diantaranya yaitu museum yang dinyatakan sebagai museum milik daerah, ternyata museum tersebut merupakan museum milik propinsi yang didirikan pada saat ajang Sail Morotai 2012 kemarin, serta belum ada serahterima museum dari Pemprov Maluku Utara kepada Pemkab Pulau Morotai. hal ini akan berpengaruh pada pendapatan daerah dikarenakan proses pengelolaan dan lain-lain merupakan kewenangan Pemprov Maluku Utara.

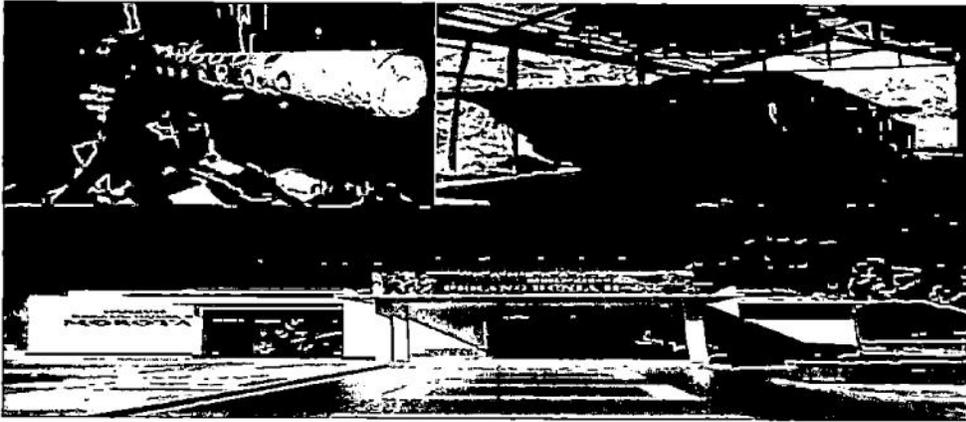
Selain problem tersebut, terdapat masalah lain yaitu museum yang merupakan milik Pemprov tersebut, dipekerjakannya pegawai dari Disparbud Kab. Pulau Morotai, bukan dari pegawai Propinsi. Berikut wawancara dengan Bapak Subandi salah satu pegawai yang bekerja di museum tersebut.

Kami bekerja sesuai dengan perintah dan arahan dari pak kadis, tugas kami hanyalah membersihkan museum dan selalu bekerja tepat waktu, jadi terkait dengan museum ini milik pemprov atau pemkab kami tidak mau ambil pusing, yang kami tahu hanyalah bekerja sesuai dengan prosedur. (Wawancara pada selasa 30/07/2013).

Sesuai dengan hasil pengamatan dilapangan ditemukan ada empat pegawai yang dipekerjakan di museum tersebut dan bahkan aliran gajinya pun lumayan besar karena mengalir dari dua instansi, yaitu dari Disparbud Kab.Pulau Morotai dan Dispar Provinsi. semestinya Pemkab Pulau Morotai harus bersikeras untuk mengambil dan mengelola museum tersebut demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi di daerah dari segi pariwisata sejarah.

Penemuan situs-situs baru ataupun pemeliharaan berbagai peninggalan sejarah atau pun museum, dilakukan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban dinas semata atau “kenikmatan” disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Agar apresiasi terhadap peninggalan sejarah dapat lebih ditingkatkan maka pola berfikirpun hendaknya diadakan pula *re-positioning* yakni dengan menjadikannya sebagai salah satu daya tarik wisatawan dunia untuk berkunjung ke Pulau Morotai. Perubahan ini tidak akan merusak keberadaan dari benda-benda bersejarah bahkan akan makin memberikan apresiasi yang lebih tinggi lagi baik terhadap upaya pemeliharaan benda bersejarah maupun terhadap budaya bangsa. Berikut adalah gambar dari sisa-sisa peninggalan sejarah serta museum yang menjadi keunikan tersendiri dari sisi Wisata Sejarah.

Gambar 6. Museum PD II di Kab. Pulau Morotai



Sumber hasil penelitian 2013

Salah satu fungsi museum adalah sebagai tempat menyimpan dan memajang benda warisan budaya (*cultural heritage*). Museum berfungsi sebagai pengelolaan warisan budaya sesungguhnya memiliki ideologi yang sama dengan pariwisata budaya yakni memberikan informasi dan pelayanan kepada publik dan/atau wisatawan tentang fungsi dan makna suatu artefak ataupun event tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa warisan sejarah belakangan ini merupakan daya tarik wisata yang sangat signifikan. Wisatawan pada umumnya cenderung ingin memahami tentang asal-usul sejarah masa lalu yang dianggap masih autentik. Selain itu, wisatawan juga ingin memahami kebudayaan yang berbeda dengan yang mereka miliki. Dalam konteks ini museum adalah tempat wisatawan untuk dapat melihat dan memahami warisan budaya masa lalu dari etnik lain, yang berasal dari kurun waktu yang berbeda. *Eksibisi* dan pengelolaan benda warisan budaya seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga menarik minat wisatawan. Selain obyek wisata histori yang telah di museumkan, masih banyak lagi terdapat obyek-obyek wisata sejarah yang belum ada tindakan dari Disparbud

dalam memelihara dan melestarikan obyek tersebut. Berikut adalah obyek-obyek wisata yang belum dipelihara dan dilestarikan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan hasil observasi peneliti.

Gambar 19. puing-puing peninggalan PD II yang terabaikan



Sumber. Observasi peneliti tahun 2013

Seharusnya dengan beragamnya potensi dan obyek wisata sejarah ada di Kabupaten Pulau Morotai mampu dikelola secara maksimal oleh dinas pariwisata dan kebudayaan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Morotai dan bukti bahwa morotai merupakan tempat pendaratan Mc. Arthur dapat terekspos pada khalayak yang diharapkan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Pulau Morotai karena keunikannya.

Selain wisata sejarah, keunikan tersendiri yang ada di Kabupaten Pulau Morotai adalah wisata Budaya. Pada dasarnya Kabupaten Pulau Morotai Tidak mempunyai penduduk asli, namun pendatang dari Pulau Halmahera sebagian besar Suku Tobelo dan Galela dan memiliki keterkaitan garis keturunan. Karakteristik budaya masyarakat Morotai adalah perpaduan budaya Halmahera secara umum dan lebih khusus budaya dan adat Tobelo-Galela. Bagi masyarakat Morotai, laut dianggap sebagai warisan nenek moyang mereka yang harus dijaga

dan penggunaannya untuk seluruh keturunan masyarakat Morotai adalah bajak laut (Suku *Changa* dalam bahasa galela). Maka masyarakat Morotai juga melakukan upacara-upacara adat yang diperuntukkan agar terjadi keseimbangan alam atas dieksploitasi sumberdaya kelautan. Pemanfaatan kelautan Morotai sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Morotai untuk memenuhi kebutuhan subsistem mereka.

Mengenai suku Moro sendiri ada beberapa tetua (pemuka adat atau orang yang dituakan di Morotai) yang mengatakan bahwa suku Moro adalah penduduk asli Pulau Morotai, suatu pulau yang berada diujung Halmahera Utara dan merupakan pulau paling utara dari gugusan kepulauan Indonesia, tapi tidak pernah dijelaskan apakah ada hubungan antara suku Moro yang misterius dengan suku Moro di Filipina. Selain itu, Suku Moro juga diyakini sebagai suku yang dahulu pernah berdiam di Jailolo (Halmahera), dibawah kepemimpinan seorang raja yang adil dan bijaksana, kemudian sekitar abad ke lima belas saat Portugis masuk ke bumi Halmahera, menjajah dan mengambil rempah-rempah, menarik pajak yang sangat tinggi dari warga setempat, mengadu domba hingga terjadilah pergolakan dan perang saudara. Ditengah kecamuk perang saudara, Kerajaan Jailolo yang dihuni oleh suku Moro dibawah perintah sang raja memutuskan untuk melarikan diri ke hutan, setelah lama menghilang ke dalam hutan suku ini diyakini masyarakat halmahera telah gaib tapi kisah interaksi masyarakat setempat dengan suku Moro ini masih terdengar hingga saat ini. (Lembaran Badan perencanaan pembangunan Daerah 2013 dan cerita para tetua di Pulau Morotai). Suku Moro bukanlah suku terasing yang ada di Kabupaten Pulau Morotai seperti halnya suku

Togutil yang menyebar dan berdiam di hutan-hutan Kabupaten Pulau Morotai seperti di Tobelo, Kao, Dodaga dan wilayah lain di Kabupaten Pulau Morotai. keberadaan suku Togutil masih bisa dilacak hingga saat ini, walaupun tentu saja tidak mudah bertemu mereka, karena layaknya suku terasing di wilayah lain Indonesia suku Togutil tidak suka atau tidak mau bertemu dengan orang asing.

Dikarenakan di Kabupaten Pulau Morotai mendominasi suku Galela-Tobelo, maka menyebabkan jenis tariannya sama seperti budaya yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Adapun tarian dan music tradisional yang masih ada hingga saat ini di Kabupaten Pulau Morotai adalah ; Tarian Tide-tide, Cakalele, Denge-denge, Bobaso, Salumbe, Tokuwela, Yangere dll. Sedangkan jenis musik tradisional meliputi music bamboo tiup, gala dll.

Gambar 20. Tarian Daerah Kabupaten Pulau Morotai



Sumber dokumentasi disarbud Kab. Pulau Morotai

Kabupaten Pulau Morotai seperti daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia juga memiliki potensi wisata budaya yang layak untuk dikembangkan Kalau dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Propinsi Maluku Utara, morotai

masih menjadi primadona yang paling banyak memiliki potensi kepariwisataan. Dengan demikian, sudah semestinya kalau pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai diarahkan pada pengembangan kepariwisataan karena Pulau Morotai mempunyai obyek wisata cukup beragam. Untuk mengembangkan potensi kepariwisataan tersebut, peranan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai sangat diperlukan sebagai upaya untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan serta tanggung jawab di daerah. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Hangewa selaku Kepala Bidang Sejarah dan Budaya

Pulau Morotai sangatlah potensial dan unik dari segi budaya, karena selain mitos sejarahnya yang turun temurun (bangsa moro) juga menjadi daerah yang memiliki perpaduan budaya (akulturasi) budaya, karena didalamnya banyak suku mulai dari suku galela, tobelo sanger dll yang menyebabkan tradisi yang beragam ditemui di Pulau Morotai inilah yang menambah daya tarik keindahan pariwisata budayanya (Wawancara pada hari rabu 31/07/2013. Pukul 13.00. WIT)

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai, sudah selayaknya Kinerja dari dinas pariwisata harus bekerja secara optimal demi terwujudnya tujuan yang diharapkan. Berikut adalah beberapa titik yang menjadi obyek wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai yang sudah terdeteksi keberadaannya baik wisata bahari, alam, sejarah maupun panorama pulau-pulau surga yang indah.

Tabel 19. Obyek Wisata di Kabupaten Pulau Morotai.

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
1	Pulau Zum-zum	Kec. Morsel
2	Pulau Dodola Besar dan Kecil	Kec. Morsel
3	Pulau Ngele-Ngele	Kec. Morselbar
4	Pulau Galo-Galo	Kec. Morsel
5	Pulau Kolorai	Kec. Morsel
6	Pulau Loleba	Kec. Morsel
7	Pulau Mitita	Kec. Morsel
8	Pulau Kokoya	Kec. Morsel
9	Pulau Tabailenge	Bere-Bere, Kec. Morut
10	Pulau Saminyamau	Pulau Rao Kec. Morselbar
11	Air Terjun Kekere & Kokota River	Trans SP II Kec. Morsel
12	Air Terjun Raja	Desa Raja Kec. Morselbar
13	Air Terjun Lapas Dosa	Desa Sopi Kec. Morotai Jaya
14	Air Terjun Mira	Desa Mira Kec. Mortim
15	Air Kaca	Totodoku/Wawama Kec. Morsel
16	Air Saha	Totodoku/Wawama Kec. Morsel
17	Pantai Sagolo	Desa Juanga, Kec. Morsel
18	Pantai Rorasa	Kec. Morotai Utara
19	Pantai Sopi (Surving)	Desa Sopi Kec. Morotai Jaya
20	Desa Buho-Buho (Surving)	Desa Buho-Buho Kec. Mortim
21	Pantai Cendana	Desa Cendana, Morotai Jaya
22	Pantai Korago	Desa Korago Kec. Morotai Utara
23	Batu Kopi	Desa Posi-posi, Pulau Rao
24	Tanjung Gorango	Kec. Morotai Utara
25	Tanjung Pinang	Desa Sambiki, Kec. Mortim
26	Tanjung Dehegila	Desa Juanga, Kec. Morsel
27	Army Dock dan Navy Base	LOC Darame, Morsel
28	Tank Amphibi	Gotalamo, Morotai Selatan
29	Museum Perang Dunia II	Desa Juanga, Kec. Morsel
30	Morotai Wreck	0,29 Mil Depan lapangan Pante
31	Lapangan Pante	Wawama, Morotai Selatan
32	Waterpomp	Darame, Morotai Selatan
33	Hill 40	Trans SP II Kec. Morsel
34	Persembunyian Nakamura	Trans SP II Kec. Morsel
35	Kuali Jepang	Lulusu, Morsel
36	Rumah Radio Jepang	Wayabula, Morselbar
37	Bekas Makam Serdadu Jepang	Pandangan, Morotai Selatan
38	Makam Sekutu	Juanga, Morotai Selatan
39	Goa Jepang	Trans SP II Kec. Morsel
40	Goa Purba	Daeco, Morotai Selatan
41	Goa Sangowo	Sangowo, Morotai Timur
42	Goa Mira	Desa Mira Kec. Mortim
43	Goa Burung	Desa Posi-posi, Pulau Rao

Sumber. Renstra Disparbud Kab. Pulau Morotai

Tabel 19. Objek Wisata di Kabupaten Pulau Morotai

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
1	Pulau Xumi-Xumi	Kec. Morotai
2	Pulau Dobo, Besar dan Kecil	Kec. Morotai
3	Pulau Nigle-Nigle	Kec. Morotai
4	Pulau Gato-Gato	Kec. Morotai
5	Pulau Kotori	Kec. Morotai
6	Pulau Uleba	Kec. Morotai
7	Pulau Mita	Kec. Morotai
8	Pulau Kokoya	Kec. Morotai
9	Pulau Tabilinang	Pure-Bere, Kec. Morotai
10	Pulau Sandiyanan	Pulau Rao, Kec. Morotai
11	Air Terjun Kere & Kokota River	Trusmi SP II, Kec. Morotai
12	Air Terjun Raja	Desa Raja, Kec. Morotai
13	Air Terjun Lapa-Da	Desa Sopi, Kec. Morotai
14	Air Terjun Mita	Desa Mita, Kec. Morotai
15	Air Panas	Totokun/Wanama, Kec. Morotai
16	Air Saha	Totokun/Wanama, Kec. Morotai
17	Pantai Pango	Desa Juanga, Kec. Morotai
18	Pantai Rorasa	Kec. Morotai Utara
19	Pantai Sopi (Surving)	Desa Sopi, Kec. Morotai Utara
20	Desa Bulu-Riho (Surving)	Desa Bulu-Riho, Kec. Morotai Utara
21	Pantai Candana	Desa Candana, Morotai Utara
22	Pantai Koro	Desa Koro, Kec. Morotai Utara
23	Batu Sopi	Desa Posi-Posi, Pulau Rao
24	Tanjung Goro	Kec. Morotai Utara
25	Tanjung Pinang	Desa Sandiki, Kec. Morotai
26	Tanjung Debelia	Desa Juanga, Kec. Morotai
27	Angg Dock dan Waru Hare	LOD Darime, Morotai
28	Tanah Ampibi	Geolain, Morotai Selatan
29	Museum Perang Dunia II	Desa Juanga, Kec. Morotai
30	Morotai Wara	Desa W. Dapan, Kecamatan Pura
31	Lapangan Pura	Wanama, Morotai Selatan
32	Waterpomp	Darime, Morotai Selatan
33	Hill 40	Trusmi SP II, Kec. Morotai
34	Pemukimannya Nakamun	Trusmi SP II, Kec. Morotai
35	Kuali Jepang	Iluau, Morotai
36	Rumah Rado Jepang	Wabula, Morotai
37	Bekas Markas Angkatan Laut Jepang	Pandara, Morotai Selatan
38	Makam Sekutu	Juanga, Morotai Selatan
39	Gua Jepang	Trusmi SP II, Kec. Morotai
40	Gua Pupa	Desa Morotai Selatan
41	Gua Sandoro	Sandoro, Morotai Timur
42	Gua Mita	Desa Mita, Kec. Morotai
43	Gua Rurung	Desa Posi-Posi, Pulau Rao

Sumber: Rastera Dispersud Kab. Pulau Morotai

Begitu beragamnya obyek wisata yang ada di Pulau Morotai yang telah diuraikan dari tabel diatas, menunjukkan bahwa Pulau Morotai memiliki keunggulan dibidang pariwisata, serta memiliki keragaman wisata mulai dari wisata bahari, wisata budaya dan wisata sejarah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sukri Marasabesi selaku Kepala Bidang Destinasi Wisata

Saat ini sudah terdeteksi ada 50 destinasi wisata di Pulau Morotai, dan beragam obyek wisata, mulai dari bahari, budaya, sejarah maupun pulau-pulau kecil yang indah, namun Disparbud hanya berkonsentrasi pada pengembangan pulau dodola dan sekitarnya yang berada di seputaran kecamatan morotai selatan, karena keterbatasan biaya. (Wawancara pada hari selasa 09/07/2013 pukul 15.00. WIT).

Dari Wawancara tersebut, terlihat jelas bahwa potensi wisata yang sudah terdeteksi keberadaannya yaitu ada 50 destinasi wisata, sehingga perlu kiranya obyek wisata tersebut dapat dikelola secara maskimal oleh Disparbud Pulau Morotai dalam rangka menambah pendapatan daerah dari segi pariwisata. Namun Disparbud Kab. Pulau Morotai hanya berkonsentrasi pada pengembangan infrastruktur pulau dodola saja yang berakibat pada tidak tersentuhnya beberapa obyek wisata yang sudah terdeteksi keberadaannya yang memang perlu dilakukan pengelolaan, pelestarian dan pengembangan beberapa obyek wisata. Jadi pada dasarnya keberadaan obyek wisata tersebut belum diikuti oleh perkembangan pariwisata yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat perkembangan objek dan daya tarik wisata serta kunjungan wisata ke tiap objek wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.

Kondisi demikian menyebabkan perlunya suatu penataan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata Kabupaten Pulau Morotai yang

meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pulau Morotai. Penataan dan pengembangan berbagai potensi pariwisata dengan segala fasilitas pendukungnya memerlukan upaya dan usaha dari berbagai pihak terutama instansi/lembaga dan dunia usaha yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pembangunan kepariwisataan.

Namun orientasi pembangunan infrastruktur di daerah tempat wisata hanyalah diorientasikan di seputaran Morotai Selatan dikarenakan keterbatasan anggaran. Padahal pengembangan pariwisata jangan hanya bergantung pada besarnya pos APBD, tetapi dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari Disparbud dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang ada, sehingga pariwisata sebagai penopang pendapatan daerah dan mampu bersaing pada skala Nasional bahkan internasional bukan sebaliknya.

V.3. Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata di Kab. Pulau Morotai

Dalam sub bab ini diuraikan mengenai persepektif disparbud dalam pengembangan pariwisata, posisi disparbud dan pola kegiatan yang dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan tahun 2013.

V.3.1. Prespektif Disparbud Kabupaten Pulau Morotai

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan sebagai visinya bahwa mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menggerakkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, yakni : (1) mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu

mendorong pembangunan daerah; (2) mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta mendorong pembangunan daerah; (3) mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas; dan (4) menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. (Lembaran Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2103).

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa. Pengembangan pariwisata di kabupaten pulau morotai memiliki prospektif jangka panjang dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Berikut adalah wawancara dengan Ahmad Rahyan, selaku kepala bidang promosi dan pemasaran.

Prospektif disarbud kab. Pulau morotai adalah bagaimana mendorong peningkatan citra kab. Pulau morotai sebagai daerah tujuan wisata yang berkelas nasional bahkan internasional yang berdaya saing, mendapat kenyamanan serta berkelanjutan. Untuk itu upaya dalam merealisasinya sudah terurai jelas dalam visi misi, dan tujuan dari Dinas Pariwisata Kab. Pulau Morotai. (Wawancara pada hari Jumat 26/07/2013. Pukul 11.20.WIT)

dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa prespektif pengembangan pariwisata di Pulau Morotai merupakan bentuk peningkatan citra pariwisata sehingga pariwisata di pulau morotai dapat mencapai tingkat nasional bahkan internasional yang berdaya saing dan mampu memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang berkunjung di Kab. Pulau Morotai karena beragamnya obyek dan potensi wisata yang ada mulai dari wisata bahari, histori, panorama pulau-pulau yang indah, dan benda-benda peninggalan PD II, dari beragamnya potensi tersebut, sehingga Pemkab Pulau Morotai berorientasi pada pengembangan pariwisata dan perikanan, sesuai dengan Grand besar Visi dari Bupati Pulau Morotai yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya.

Untuk mejewantahkan Visi tersebut, Disparbud sebagai elemen didaerah merealisasikan dan tercermin dalam Visi dari Disparbud yaitu Morotai sebagai Destinasi Wisata Dunia Berbasis Bahari, Budaya. Destinasi Wisata Dunia. memiliki arti bahwa Pulau Morotai berupaya melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh, terpadu, bertahap dan berkelanjutan melalui upaya penyediaan sumberdaya dan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, aksesabilitas, dukungan kesiapan dan keterlibatan masyarakat, *positioning* pariwisata secara strategis dalam pembangunan daerah guna meraih kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, sebagai indicator daerah wisata destinasi dunia, bahari dan wisata sejarah. (Renstra Disparbud)

Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa Kab. Pulau Morotai berupaya melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan yang berbasis wisata dunia. Bahari dan budaya. Namun orientasi visi tersebut masih jauh dari apa yang

diharapkan. Terlihat jelas dari kondisi daerah yang belum mampu menerima beban tersebut. Banyak factor yang harus dilihat dalam rangka untuk mendorong pariwisata yang bumi. Salah satu diantaranya kesiapan infrastruktur dan suprastruktur. Keberadaan pariwisata di Kab. Pulau Morotai belum terkenal secara nasional Hanya pada tataran propinsi Maluku Utara. namun ada hal yang menarik ketika di laksanakan Ivent Sail Morotai 2012, multi proyek dari pemerintah pusat, menyebabkan ada perubahan pesat dari sisi infrasturktur dan pengembangan pariwisata di Kab. Pulau Morotai. berikut Wawancara dengan Revi Dara selaku Kadis Pariwisata Kab. Pulau Morotai.

Sail Morotai yang diadakan di tahun 2012 berdampak signifikan terhadap pariwisata di Kab. Pulau Morotai. selain banyaknya kunjungan Wisman, dari sisi kucuran anggaran untuk pengembangan pariwisataapun berjalan secara maksimal dari pemerintah pusat dan daerah, hal ini merupakan keuntungan tersendiri bagi Kab. Pulau Morotai. (Wawancara, pada hari Senin 15/07/2013. Pukul 16.00.WIT)

Pariwisata berkelas dunia dapat dicerminkan dengan adanya karakteristik yaitu memiliki keunikan, kekhasan dan kearifan lokal yang bercita rasa internasional. Memiliki layanan yang memenuhi standar internasional dan memberikan nilai dan kesan bagi wisatawan yang datang kedaerah tersebut. Saat ini icon pariwisata untuk menuju pada destinasi wisata dunia, hanya bergantung pada keindahan pulau dodola semata. Disisi lain, pengembangan pariwisata yang berkelas dunia, haruslah melihat aspek-aspek yang lainnya.

Untuk itu, sebagai langkah awal dalam memajukan potensi wisata di Pulau Morotai dengan mengundang para wisatawan untuk datang, tentunya hal tersebut tidaklah mudah, yang paling utama saat ini adalah dengan menggelar *event-event*

pariwisata tentu ini akan cukup mempengaruhi tingkat visitor ke Pulau Morotai. Dinas pariwisata beserta para sponsor tentu memiliki peran penting dalam hal ini dengan menyuguhkan beragam keindahan wisata yang menciptakan pengalaman yang menarik bagi para wisatawan yang datang. *Event-event* yang diselenggarakan akan berperan sebagai sarana promosi paling strategis dan salah satu Ivent yang sudah terselenggara adalah Sail Morotai 2012.

Pada dasarnya minat utama wisatawan datang ke suatu destinasi wisata lebih disebabkan karena daya tarik wisata budaya dan kehidupan alam yang menjanjikan dengan kekayaan seperti adat istiadat, peninggalan sejarah dan Purbakala, Kesenian, Monumen, Upacara upacara dan peristiwa budaya lainnya. Atraksi budaya dan Pariwisata yang beragam menjadi potensi yang sangat besar dalam peningkatan kepariwisataan. Kondisi inilah yang menyebabkan Morotai menjadi primadona karena memiliki keunikan tersebut.

V.2.2. Posisi Pariwisata Kab. Pulau Morotai

Tidak sedikit daerah-daerah di Indonesia mulai banyak yang menggali, membangun dan mengembangkan obyek pariwisata daerahnya. Hal ini dikarenakan daerah-daerah di Indonesia menyadari manfaat adanya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu daerah yang sangat mengandalkan sektor pariwisata dalam membangun daerahnya. Hal tersebut dikarenakan posisi atau letak Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri sangat strategis yaitu berada di kawasan asia pasifik sehingga

kedepannya morotai akan di jadikan simpul kawasan pasifik yang terlewati jalan utama penghubung antar Kabupaten Pulau Morotai dengan negara lain.

Untuk itu, dalam memenuhi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal ekonomi, dengan melihat dan memanfaatkan peluang yang ada, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya dalam membangun dan mengembangkan pariwisata agar kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi terpenuhi. Upaya-upaya tersebut yaitu dengan menyusun dan melaksanakan berbagai strategi dalam membangun, dan mengembangkan kepariwisataan daerah. Selain itu upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pulau Morotai dalam membangun dan mengembangkan kepariwisataan daerah yaitu dengan membuka dan memperluas jejaring atau kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta, masyarakat, maupaun pemerintah daerah lainnya dalam hal penyelenggaraan kepariwisataan daerah. Semua upaya-upaya tersebut terus dilakukan agar kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai dapat meningkat.

Dengan menggunakan alur logika Pemkab Pulau Morotai mengedepankan pariwisata sebagai *leading sector* (sektor utama) sesuai dengan Visi Bupati, Morotai akan digenjot dari sector perikanan dan pariwisata dalam rangka menyejahterakan masyarakat setempat. Keputusan menetapkan pariwisata sebagai sektor utama dalam pembangunan tentu dilandasi oleh beberapa pertimbangan, antara lain adalah letak Kabupaten Pulau Morotai secara geografis berada di daerah timur terluar dari Indonesia, daerah tujuan wisata utama dan pintu masuk utama bagi Negara-negara lain. Pertimbangan dari segi geografis menjadi satu sisi

yang penting bagi penentuan suatu destinasi, akan tetapi itu tidak menjadi faktor determinan. Penentuan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai tentu berangkat dari kenyataan-kenyataan lain seperti: (a) adanya Pulau Dodola (tempat persinggahan Jendral Mc. Arthur) yang menjadi ikon pariwisata eksklusif (b) Alam yang eksotis, (c) Kekayaan bahari, dan (d) Kearifan budaya lokal yang menarik dan sejarah yang mengesankan yang membuat morotai berbeda dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kesadaran akan banyaknya aset potensial yang demikian menjadikan Kabupaten Pulau Morotai memprioritaskan pariwisata sebagai fundamental pembangunan. Akan tetapi, realitas empiris menunjukkan bahwa masyarakat tidak secara optimal meraup manfaat dari keberadaan aset potensial pariwisata yang ada. Salah faktor pemicu terjadi kekosongan peran pariwisata sebagai lokomotif pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai disebabkan karena aset-aset potensial penopang pengembangan pariwisata belum seluruhnya dimaksimalkan pemanfaatannya. Sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata,

Berikut wawancara dengan Bapak Ahmad Rahyan selaku kepala Bidang Promosi dan Pemasaran.

Posisi Kabupaten pulau Morotai sangatlah strategis. Selain di apik oleh laut pasifik, morotai juga merupakan simpul kawasan ekonomi khusus yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Sebagai rangka untuk menjawab tuntutan tersebut, posisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi garda terdepan dalam mengembangkan obyek wisata yang sudah ada dengan selalu berkordinasi dengan semua elemen pendukung pariwisata. (Wawancara pada hari Jumat 26/07/2013. Pukul 11.20.WIT)

Pertimbangan dari segi geografis menjadi satu sisi yang penting bagi penentuan suatu destinasi, akan tetapi itu tidak menjadi faktor determinan. Penentuan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai tentu berangkat dari kenyataan-kenyataan lain seperti: (a) adanya Pulau Dodola (tempat persinggahan Jendral Mc. Arthur) yang menjadi ikon pariwisata eksklusif (b) Alam yang eksotis, (c) Kekayaan bahari, dan (d) Kearifan budaya lokal yang menarik dan sejarah yang mengesankan. Kesadaran akan banyaknya aset potensial yang demikian menjadikan Kabupaten Pulau Morotai memprioritaskan pariwisata sebagai fundamental pembangunan.

Selain posisinya yang sangat strategis berada di daerah terluar Indonesia timur, Kabupaten Pulau Morotai memiliki keragaman potensi kepariwisataan jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di propinsi Maluku Utara. Dengan demikian, sudah seharusnya apabila kalau prioritas pembangunan Pulau Morotai di arahkan pada pengembangan kepariwisataan. Karena beragamnya potensi yang ada Kabupaten Pulau Morotai sehingga layak untuk dikembangkan. Untuk itu dibutuhkan peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sebagai bagian dari pengembangan pariwisata, tahapan pengembangan kawasan merupakan landasan bagi perumusan/formulasi rencana lebih lanjut secara spasial. *Strategi pertama* dalam pengembangan tata ruang kepariwisataan Kabupaten Pulau Morotai adalah mengembangkan sistem keruangan wisata terpadu melalui pembentukan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP). Secara spesifik, pembagian Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kedekatan jarak antar potensi objek daya tarik wisata.
- b. Kemudahan pencapaian.
- c. Kedekatan terhadap pusat pelayanan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Pulau Morotai diarahkan dibagi menjadi 3 (tiga) KPP yaitu sebagai berikut : Kawasan Pengembangan pariwisata (KPP) I mencakup wilayah Kecamatan Morotai Selatan dan Kecamatan Morotai Timur dengan pusat pelayanan utama di Daruba yang dibantu oleh pusat pelayanan di Sangowo. Pusat pelayanan pariwisata di Daruba merupakan simpul gerbang wisata Kabupaten Pulau Morotai sehingga diarahkan pelayanannya berskala regional sedangkan di Sangowo diarahkan berskala lokal. Kawasan Pengembangan pariwisata (KPP) II mencakup wilayah Kecamatan Morotai Selatan Barat dengan pusat pelayanan di Wayabula. Pusat pelayanan pariwisata di Wayabula merupakan simpul pelayanan kegiatan wisata untuk bagian wilayah Barat Kabupaten Pulau Morotai. Skala pelayanan pariwisata di Wayabula diarahkan berskala lokal. Kawasan Pengembangan pariwisata (KPP) III mencakup wilayah Kecamatan Morotai Utara dan Kecamatan Morotai Jaya dengan pusat pelayanan di Bere-Bere dan Sopi. Pusat pelayanan pariwisata di Bere-Bere merupakan simpul pelayanan kegiatan wisata untuk bagian wilayah Utara Kabupaten Pulau Morotai. Skala pelayanan pariwisata di Bere-Bere diarahkan berskala lokal.

V.2.3. Pola Kegiatan Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai

Setiap daerah atau destinasi pariwisata memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Kondisi inilah yang dapat dijadikan

suatu promosi pariwisata dengan mengedepankan keindahan serta keunikan masing-masing daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah maka diharapkan pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing serta dapat mengidentifikasi dan menginventarisir keunikan dan keindahan masing-masing wilayahnya tidak terkecuali di Kabupaten Pulau Morotai. Selain itu, tugas utama pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai adalah agar mampu menjawab agenda prioritas yakni mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang bersumber kepada sistem ekonomi kerakyatan, serta membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya.

Pariwisata sangat berperan dalam pembangunan didaerah, yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat. pembangunan yang diperoleh dari sektor kepariwisataan telah terbukti menjadi tumpuan utama dalam pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini mendorong untuk membuka kawasan pariwisata agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian jelas bahwa pariwisata mempunyai keterkaitan dengan pembangunan sektor lain. Mengingat pembangunan pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan, maka pembangunan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kabupaten pulau morotai.

Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan pada Tahun Anggaran untuk mencapai Visi dan Misi pada Tahun Anggaran 2013 berdasarkan RENSTRA adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

- b. Melaksanakan koordinasi pembangunan objek wisata dengan lembaga dan dunia usaha
- c. Melaksanakan Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
- d. Melaksanakan perencanaan pengembangan kepariwisataan yang berkesinambungan;
- e. Melaksanakan peningkatan pelayanan pariwisata;
- f. Melaksanakan peningkatan promosi nusantara di dalam dan di luar negeri;
- g. Meningkatkan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
- h. Mewujudkan apresiasi terhadap seni budaya;
- i. Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata;
- j. Meningkatkan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (sumber Renstra Disparbud tahun 2013).

Berbagai potensi wisata yang dimiliki oleh di Kab. Pulau Morotai adalah modal dasar pengembangan kepariwisataan Indonesia. Namun, mengandalkan kekayaan alam, budaya, dan kesenian saja belum cukup untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan. Diperlukan langkah strategis untuk memasarkan dan merancang pola pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter daerah, adapun strategi yang dilakukan mulai dari pemasaran, promosi dan pola kegiatan dari disparbud. Berikut adalah wawancara dengan bapak Ahmad Rahyan selaku kepala bidang promosi dan pemasaran

Pemasaran dan promosi pariwisata diperlukan demi adanya pemahaman yang mendalam terhadap produk yang dimiliki dan dijual. Dinas pariwisata dan kebudayaan dari sisi pemasaran telah melakukan terobosan-terobosan dalam upaya untuk menjual obyek dan potensi wisata yang ada di Kab.

Pulau Morotai salah satu diantaranya melakukan analisis pasar terkait dengan membangun persepsi wisatawan dan berkordinasi dengan beberapa kabupaten/kota dan propinsi yang ada di negara tercinta . (Wawancara pada hari Jumat 26/07/2013. Pukul 11.10.WIT)

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa program pemasaran yang dilakukan oleh Disparbud adalah menganalisis pasar terkait dengan membangun persepsi wisatawan terhadap pariwisata yang ada di Kab. Pulau Morotai, tentunya dengan persepsi yang dibangun diharapkan akan menarik wisatawan untuk mau berkunjung ke kab. Pulau morotai karena memiliki keunikan pariwisata yang ada di Kabupaten pulau morotai serta bisa menjawab kebutuhan akan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Akan tetapi dari pengamatan, didapati bahwa Disparbud belum optimal dalam menganalisis akan kebutuhan dan keinginan konsumen/wisatawan, terlihat dari berkurangnya minat wisatawan yang datang ke Kabupaten Pulau Morotai sehingga persepsi yang dibangun yaitu morotai sebagai surga dari ujung timur yang aman tertib dan nyaman hanya sebatas slogan dan tidak ada aplikasinya (lihat pada bab sebelumnya).

Pada dasarnya Setiap pemasaran, termasuk pemasaran pariwisata pada awalnya dimulai dengan membuat analisis pasar wisata. Analisis ini meliputi analisis persepsi dan preferensi wisatawan. Pada umumnya calon wisatawan menginginkan suatu produk wisata tertentu. Faktor *sosiodemografi* dan *psikografi* memiliki peran yang sangat besar dalam memilih macam produk dan destinasi pariwisata. Berawal dari data inilah bagaimana pemasaran harus dilakukan. Jelas bahwa dalam proses pemasaran pihak pemilik produk harus bisa menyesuaikan dengan keinginan wisatawan atau menyesuaikan dengan segmen wisatawan yang

berminat pada jenis produk yang dimilikinya. Seharusnya, organisasi mengambil keputusan untuk membangun persepsi pasar potensial terhadap suatu produk/jasa yang unggul agar tampak berbeda dengan produk yang lain.

Analisis pasar dimaksudkan untuk menemukan dan mengenali potensi dan karakteristik calon pasar bagi wilayah perencanaan antara lain dari segi kuantitatif (jumlah wisatawan yang ingin diraih) dan kualitatif yang meliputi asal wisatawan, lama tinggal, karakteristik wisatawan. Analisis pasar ini akan menentukan arah pengembangan atraksi dan produk wisata yang akan dikembangkan, kebutuhan sarana transportasi serta kebutuhan akomodasi. Analisis pasar ke wilayah perencanaan harus memperhatikan pola kunjungan wisatawan (mancanegara dan domestik) ke wilayah yang lebih luas (lingkup propinsi). Mengingat wilayah perencanaan adalah kabupaten, maka analisis kunjungan wisatawan harus dilakukan dengan lebih detail. Analisis ini merupakan masukan penting dalam perencanaan objek dan daya tarik wisata, penentuan pengembangan fasilitas pariwisata, pelayanan, transportasi dan prasarana pendukung lainnya. Selain itu, analisis pasar juga merupakan dasar untuk merumuskan strategi pemasaran dan program promosi. Fokus utama dalam analisis pasar adalah sebagai masukan dalam persiapan perencanaan pariwisata.

Namun karena perkembangan pariwisata secara umum, produk wisata dan daya saing dari sektor ini mengalami perubahan yang sangat cepat, maka analisis pasar secara terpisah dan kontinyu dapat merupakan suatu elemen penting dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah. Dalam proses penyusunan RIPKDA kabupaten, analisis pasar tidak dilakukan secara mendalam, namun lebih bersifat

umum mengingat bahwa kunjungan wisatawan tidak dapat dibatasi oleh batasan administratif tetapi merupakan suatu bagian yang terintegrasi dengan wilayah-wilayah disekitarnya. Trend kunjungan serta pola perjalanan wisatawan ke suatu propinsi menjadi acuan didalam melakukan analisis pasar pada tingkat kabupaten.

Menurut Porter (2007), ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum (strategi generik). Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk yang menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang tidak terlalu peduli dengan perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen

Upaya kegiatan mempromosikan tempat kunjungan wisata sangat diperlukan oleh daerah-daerah yang memiliki banyak potensi. Tentunya upaya kegiatan ini menjadi sangat penting dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia yang dirancang dengan baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi didaerah. Pada dasarnya Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan dengan tujuan untuk Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial, Untuk

mendapatkan kenaikan penjualan dan profit/laba, Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar, Membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing, Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan dan Mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Ahmad Rahyan selaku Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran.

Potensi dan obyek wisata di Kab. Pulau Morotai begitulah beragam, strategi yang kami lakukan dalam rangka menarik pengunjung untuk datang adalah hanya melakukan promosi baik di media massa maupun elektronik, disadari memang bahwa kami memiliki keterbatasan dari sisi anggaran dan lain-lain, jadi pada dasarnya kami bekerja hanya sesuai dengan postur anggaran APBD. (Wawancara pada hari Jumat 26/07/2013. Pukul 11.00.WIT)

Dalam upaya mengembangkan potensi dan obyek pariwisata di Kab. Pulau Morotai, Disparbud melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan yaitu dengan melakukan promosi baik di media masa maupun media elektronik, Strategi promosi yang dilakukan Disparbud Kab. Pulau Morotai dalam mempromosikan obyek wisata sebenarnya sudah ada. Namun peranannya belum maksimal. Hal ini disebabkan keterbatasan dana yang digunakan untuk mempromosikannya. Padahal Kunci utama kedatangan wisatawan mancanegara atau suksesnya program pariwisata sangat bergantung pada strategi promosi yang dilakukan. Strategi promosi merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memulihkan kondisi pariwisata Indonesia khususnya Kabupaten Pulau Morotai, strategi promosi harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Media massa dan elektronik sebagai salah satu alat yang kuat untuk melakukan suatu penyebaran informasi dan promosi yang dapat mudah mempengaruhi orang-orang yang melihatnya. Media adalah sarana yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan, dari pesan tersebut dapat mempengaruhi dan juga mengarahkan sikap serta pilihan untuk mengambil keputusan. Disektor pariwisata media juga dapat digunakan sebagai sarana yang efektif. baik itu menggunakan media konvensional (cetak, koran, radio dan televisi) ataupun media baru (internet, sosial media facebook, twitter, youtube ataupun plurk--, dan IT). namun terkait web Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten pulau Morotai dari hasil pengamatan dilapangan, sampai sejauh ini belum memiliki situs web di internet. Padahal Web adalah saluran ideal dan alat yang ampuh untuk mempromosikan daerah tujuan wisata, dengan biaya yang sangat murah. Namun dalam berkompetisi ini yang harus diperhatikan, karena merupakan senjata utama kita, adalah kualitas dari informasi itu sendiri. Karena wisatawan akan mendasarkan keputusannya untuk mengunjungi suatu DTW atau obyek wisata hanya kepada berbagai informasi yang tersedia untuk mereka di Web.

Perbaikan *image* dan revitalisasi produk pariwisata dapat dilakukan melalui promosi di berbagai media, baik cetak maupun elektronik serta *brosur/leaflet* yang menyajikan informasi potensi wisata dan kondisi keamanan suatu daerah. Promosi merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran pariwisata yang tidak bisa berjalan sendiri dan terpisah dari indikator-indikator bauran pemasaran pariwisata yang lainnya. Strategi pengembangan pariwisata harus memberikan rasa aman dan ketenangan bagi wisatawan untuk dapat

menikmati obyek wisata yang disajikan. Melalui cara ini, citra suatu daerah dapat ditingkatkan dan kesan baik bangsa lain terhadap bangsa kita dapat ditumbuh kembangkan.

Berkembang atau tidaknya suatu daerah menjadi destinasi wisata bergantung pada produk pariwisata yang ditawarkan oleh daerah tersebut. Semakin bagus dan bersaingnya produk yang dihasilkan, semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Produk pariwisata yang ada memerlukan sentuhan baru, dan dikemas lebih bervariasi agar tidak terkesan monoton dan murahan. Jika beberapa hal diabaikan, strategi promosi sekuat apapun atau pembenahan kawasan sehebat apapun tidak akan berarti apa-apa apabila citra (*image*) suatu daerah tujuan wisata tidak bagus. Untuk memberi jaminan rasa aman harus dipadukan antara promosi dengan tindakan selama melakukan kegiatan promosi. Artinya, bagaimana strategi yang harus dipakai dan dilakukan untuk bisa mendukung terciptanya kegiatan promosi yang baik sehingga akan bisa mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sukri Marasabesi selaku Kepala Bidang Destinasi Wisata.

Harus diakui bahwa Kab. Pulau Morotai masih belia, belum lagi keterbatasan infrastruktur, namun terlalu berlebihannya promosi menyebabkan tingkat kekecewaan wisatawan pun tinggi, jadi pengembangan pariwisata haruslah sesuai dengan kondisi alamiah yang ada di Kab. Pulau Morotai (Wawancara pada tanggal hari Jumat, 26/07/2013. Pukul 16.00. WIT)

Kondisi demikian menggambarkan bahwa strategi promosi haruslah disesuaikan dengan kondisi obyektif yang ada dilapangan, artinya bahwa jangan terlalu berlebihan dalam melakukan promosi, namun hal ini sangatlah berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Porter, menurutnya organisasi harus

memutuskan untuk membangun persepsi pasar potensial terhadap produk yang unggul agar tampak berbeda sehingga ada rasa ketertarikan untuk membeli/melihat dan mengunjungi meskipun harus dibayar dengan harga yang mahal sekalipun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti meliputi Perkembangan trend kepariwisataan dunia yang mengarah pada beberapa jenis pariwisata alternative, seperti : wisata budaya, wisata maritim/bahari, wisata pertanian (agrowisata), wisata alam (ecotourism) dan sebagainya, Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan, khususnya yang berbasis IT sehingga mempengaruhi kinerja dinas secara umum, Keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan. Pesatnya perkembangan *teknologi*, informasi dan komunikasi (TIK) menuntut SDM yang memiliki KSA (Kompetensi, Skill, Attitude) yang memadai, sehingga pendidikan dan pelatihan secara berkala sangat diperlukan. Standarisasi fasilitas dan pelayanan kepariwisataan berlandaskan Sapta Pesona Sadar Wisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah-tamah dan kenangan).

Keterbatasan komunikasi dan koordinasi (*poor communication and coordination*) yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan baik secara intern dinas maupun ekstern lintas sektoral dan Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan pencapaian yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan perencanaan selanjutnya.